

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012, telah diatur mengenai retribusi daerah;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan retribusi daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah dan adanya perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3814);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Unsur Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tk. I dan Daerah Tk. II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
23. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Komoditas Hasil Pertanian di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2004 Nomor 62);
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31);
25. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2004);

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
 dan
 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 6 Pasal 1 diubah dan diantara angka 12 dan angka 13 Pasal 1 disisipkan 5 (lima) angka, yakni angka 12a, angka 12b, angka 12c, angka 12d, dan angka 12e, diantara angka 14 dan angka 15 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 14a, dan diantara angka 16 dan angka 17 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 16a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga dan Bentuk Badan Lainnya termasuk kontrak Investasi Kolektif dan Bentuk Usaha Tetap.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Golongan retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.
10. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa usaha yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
12. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian Izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- 12a. Retribusi Pengendalian Lalu Lintas adalah pungutan atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, kawasan tertentu pada waktu tertentu, dan tingkat kepadatan tertentu.
- 12b. Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 12c. Retribusi Perpanjangan IMTA adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
- 12d. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
- 12e. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.

14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
 - 14a. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
 15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang.
 16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
 - 16a. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur
 17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
 18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/ bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
 19. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 3 dihapus, Pasal 2 ayat (1) huruf a ditambah 1 (satu) angka yakni angka 14 dan Pasal 2 ayat (1) huruf c ditambah 1 (satu) angka yakni angka 6, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Golongan dan Jenis Retribusi sebagai berikut:
 - a. Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 3. dihapus;
 4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 5. Retribusi Pelayanan Pasar;
 6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 7. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 8. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 9. Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus;
 10. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
 11. Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang;
 12. Retribusi Pelayanan Pendidikan;
 13. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; dan
 14. Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
- b. Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:
1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 3. Retribusi Tempat Pelelangan;
 4. Retribusi Terminal;
 5. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
 6. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 7. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
 8. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
 9. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
 10. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- c. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari:
1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 3. Retribusi Izin Gangguan;
 4. Retribusi Izin Trayek;
 5. Retribusi Izin Usaha Perikanan;
 6. Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing.
3. Pasal 3 dihapus.
4. Pasal 56 ditambah 3 (tiga) ayat yakni ayat (16), ayat (17), dan ayat (18), sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

- (1) Atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor pada bidang Perhubungan dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengujian kendaraan bermotor.
- (3) Atas pelayanan penyediaan fasilitas terminal oleh unit Perhubungan dipungut retribusi dengan nama Retribusi Terminal.
- (4) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi:
 - a. pemakaian terminal penumpang mobil bus dan terminal mobil barang;
 - b. pemakaian fasilitas lainnya di terminal penumpang mobil bus;
 - c. pemakaian fasilitas terminal mobil barang; dan
 - d. pemakaian fasilitas untuk kendaraan antar jemput dalam areal terminal.
- (5) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (6) Atas pemakaian kekayaan daerah pada unit Perhubungan dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (7) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah pemakaian kekayaan daerah, yang meliputi:
 - a. pemakaian pool kendaraan;
 - b. pemakaian mobil derek; dan
 - c. pemakaian/sewa tanah area pelabuhan milik pemerintah daerah.
- (8) Atas pelayanan kepelabuhanan pada unit perhubungan dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.

- (9) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi:
- a. jasa kepelabuhanan, kenavigasian dan perkapalan; dan
 - b. jasa pelayanan perhubungan udara.
- (10) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (11) Atas pelayanan penyeberangan di atas air oleh unit Perhubungan dipungut retribusi dengan nama Retribusi Penyeberangan di Air.
- (12) Objek Retribusi Penyeberangan Di Air sebagaimana dimaksud pada ayat (11) adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, yaitu jasa pelayanan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
- (13) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (12) adalah pelayanan penyeberangan yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (14) Atas pelayanan pemberian izin trayek oleh unit Perhubungan dipungut retribusi dengan nama Retribusi izin Trayek.
- (15) Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud ayat (14) adalah pemberian izin kepada badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
- (16) Atas pelayanan pengendalian lalu lintas dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pengendalian Lalu Lintas.
- (17) Objek Retribusi Pengendalian Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (16) meliputi penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh kendaraan bermotor perseorangan dan barang.
- (18) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (17) adalah sepeda motor, kendaraan penumpang umum, kendaraan pemadam kebakaran, ambulans dan kendaraan rombongan kepala/wakil kepala negara.

5. Diantara ayat (6) dan ayat (7) Pasal 57 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6a), dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

- (1) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1).
- (2) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3).
- (3) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (6).
- (4) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (8).
- (5) Subjek Retribusi Penyeberangan di Air adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (11).
- (6) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (14).
- (6a) Subjek Retribusi Pengendalian Lalu Lintas adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (17).
- (7) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6a) adalah Wajib Retribusi.

6. Pasal 58 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (7), sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58

- (1) Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) diukur berdasarkan jenis kendaraan, jumlah kendaraan dan jangka waktu.

- (2) Tingkat penggunaan jasa terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) diukur berdasarkan jenis usaha, jenis kendaraan, jumlah kendaraan dan jangka waktu pemakaian.
 - (3) Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (7) diukur berdasarkan jenis usaha, jenis kendaraan, jumlah kendaraan dan jangka waktu.
 - (4) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (9) diukur berdasarkan jenis, jumlah, volume, ukuran dan jangka waktu.
 - (5) Tingkat penggunaan jasa penyeberangan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (12) diukur berdasarkan jenis, jumlah, volume, ukuran dan jangka waktu.
 - (6) Tingkat penggunaan jasa izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (15) diukur berdasarkan jenis kendaraan, jumlah kendaraan dan jangka waktu.
 - (7) Tingkat penggunaan jasa pengendalian lalu lintas sebagaimana dalam Pasal 56 ayat (17) diukur berdasarkan lokasi, waktu, jenis kendaraan bermotor atau indikator lainnya.
7. Pasal 59 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (7), sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 59

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) adalah dengan memperhatikan biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal kemampuan masyarakat serta aspek keadilan dan efektifitas pengendalian pelayanan.
- (2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, angsuran bunga pinjaman, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi yang mendukung penyediaan jasa yang memperoleh keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara effisien dengan orientasi pada harga pasar.

- (3) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah fasilitas/sarana lalu lintas angkutan jalan dan terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (7) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa, bunga pinjaman untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.
- (4) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (9) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, angsuran bunga pinjaman, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi yang mendukung penyediaan jasa yang memperoleh keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar, biaya survey, biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian serta biaya pembinaan.
- (5) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Penyeberangan di Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (12) dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, angsuran bunga pinjaman, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi yang mendukung penyediaan jasa yang memperoleh keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisiensi dengan berorientasi pada harga pasar, biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian serta biaya pembinaan.
- (6) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (15) adalah dengan memperhatikan biaya survey, biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian serta biaya pembinaan.
- (7) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pengendalian Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (17) adalah efektifitas pengendalian lalu lintas dan dapat menutup biaya penyelenggaraan.

8. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), ayat (4), ayat (7), ayat (9), ayat (12), ayat (15) dan ayat (17) tercantum dalam Lampiran II.F Peraturan Daerah ini.

9. Pasal 61 ditambah 3 (tiga) ayat yakni ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61

- (1) Atas pelayanan pendidikan dan pelatihan pada unit Ketenagakerjaan dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Pendidikan.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah, yaitu pelatihan Hygiene, kesehatan dan keselamatan kerja (Hyperkes) bagi Dokter perusahaan.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - c. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD; dan
 - d. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.
- (4) Atas pemakaian kekayaan daerah pada unit Ketenagakerjaan dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (5) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah pemakaian kekayaan daerah, yaitu Jasa pemakaian fasilitas ketenagakerjaan milik Pemerintah Daerah.
- (6) Atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing dipungut retribusi dengan nama Retribusi Perpanjangan IMTA.
- (7) Objek Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing yang telah memiliki IMTA dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.

- (8) Objek Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak termasuk instansi pemerintah, perwakilan Negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
10. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 62 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), dan ayat (3) Pasal 62 diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 62
- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau menikmati manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1).
 - (2) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau menikmati manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4).
 - (2a) Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA adalah badan hukum atau lembaga pemberi kerja tenaga kerja asing.
 - (3) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (2a) adalah Wajib Retribusi.
11. Pasal 63 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 63
- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pendidikan atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) diukur berdasarkan lamanya pelatihan, jumlah peserta dan penyediaan bahan pelatihan.
 - (2) Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah Fasilitas Ketenagakerjaan Milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (5) diukur berdasarkan jenis barang, volume, resiko, keahlian dan waktu.
 - (3) Tingkat penggunaan jasa pemberian perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (7) diukur berdasarkan jumlah penerbitan dan jangka waktu perpanjangan IMTA.
12. Pasal 64 ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 64

- (1) Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (2) adalah dengan memperhatikan lamanya pelatihan (jumlah jam pelajaran), biaya bahan pelatihan, tenaga instruktur, biaya cetak sertifikat, biaya konsumsi peserta.
- (2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (5) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, biaya rutin/periodik yang berkaitan dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa dan bunga pinjaman untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan guna meningkatkan prasarana dan sarana pelayanan, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (7), dengan memperhatikan jumlah penerbitan dokumen IMTA dan jangka waktu perpanjangan IMTA.
- (4) Pemanfaatan penerimaan retribusi perpanjangan IMTA digunakan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, penatausahaan, pengawasan di lapangan, penegakan hukum dan biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA serta kegiatan pengembangan keahlian dan ketrampilan tenaga kerja lokal.

13. Pasal 65 diubah, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan, Retribusi perpanjangan IMTA dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran II.G Peraturan Daerah ini.

14. Ketentuan ayat (3) Pasal 83 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 83

- (1) Atas pelayanan pemberian izin mendirikan bangunan oleh unit Pengawasan dan Penertiban Bangunan dipungut retribusi dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

- (2) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan, meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
 - bangunan milik perwakilan Negara asing berdasarkan asas timbal balik (resiprositas).
 - bangunan rumah tinggal (fungsi hunian sederhana) berupa rumah tinggal sederhana tunggal dan rumah tinggal sederhana deret dengan kriteria:
 - bangunan rumah tinggal dengan ketinggian maksimal 2 (dua) lantai tanpa mezzanine, rongga atap, basement.
 - luas bangunan dan luas tanah maksimal adalah 100 m².
 - kepemilikan bangunan perorangan bukan badan usaha kecuali apabila kepemilikan perorangan memiliki lebih dari 1 unit dalam satu lingkungan yang sama.
 - prasarana penunjang pelaksanaan pembangunan seperti bedeng kerja/direksi keet, pagar proyek yang sifatnya sementara dan berdiri hanya selama pelaksanaan pembangunan.

15. Ketentuan Pasal 86 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) adalah dengan memperhatikan biaya kegiatan dalam rangka pengendalian dan pengawasan atas penyelenggaraan bangunan gedung yang meliputi pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, pengidentifikasi, pemeriksaan dan penatausahaan
- (2) Penetapan besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

- (3) Besarnya tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan tabel berikut:

| No | Jenis Pelayanan atas Izin Bertahap | Persentase RPP |
|--|--------------------------------------|----------------|
| 1 | Izin Pendahuluan Pondasi | 10 % |
| 2 | Izin Pendahuluan Struktur Menyeluruh | 50 % |
| 3 | Izin Menyeluruh | 20 % |
| 4 | IMB | 20 % |
| Akumulasi Tingkat Penggunaan Jasa s.d IMB Total= | | 100 % |

16. Ketentuan Pasal 129 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 129

Pemungutan Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, baik administrasi maupun teknis pemungutannya, dilaksanakan di bawah koordinasi BPKAD.

17. Pasal 141 ayat (1) huruf a, ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 141 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 141

- (1) Sanksi administratif berupa denda dikenakan kepada wajib Retribusi apabila melakukan pelanggaran ketentuan peraturan terhadap:
 - a. dihapus.
 - b. pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - c. pelayanan Pengawasan dan Penertiban Bangunan.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.

18. BAB XXIV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XXIV

PENINJAUAN DAN PENETAPAN TARIF

19. Pasal 145 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 145 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 145

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di tetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Dihapus.

20. Diantara Pasal 146 dan Pasal 147 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 146A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 146A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

21. Lampiran I huruf A. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL dihapus, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf A.
22. Lampiran II huruf C, Lampiran II huruf D, Lampiran II huruf F, Lampiran II huruf G, Lampiran III huruf A, Lampiran III huruf D, Lampiran III huruf E, Lampiran III huruf F, dan Lampiran IV huruf B Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf C, Lampiran II huruf D, Lampiran II huruf F, Lampiran II huruf G, Lampiran III huruf A, Lampiran III huruf D, Lampiran III huruf E, Lampiran III huruf F, dan Lampiran IV huruf B Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2015 NOMOR 101

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH**

I. UMUM

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah merupakan pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan retribusi daerah, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 perlu diubah guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, adanya perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang retribusi daerah, yakni dengan telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, maka perlu mengatur pengendalian lalu lintas kendaraan bermotor perseorangan dan barang pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu sebagai Retribusi Jasa Umum dan penerbitan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang merupakan urusan Pemerintah Daerah sebagai Retribusi Perizinan.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 3

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

Cukup jelas.

Ayat (16)

Cukup jelas.

Ayat (17)

Yang dimaksud “kendaraan bermotor perseorangan” adalah kendaraan bermotor yang tidak digunakan untuk umum, meliputi mobil penumpang, mobil bus, dan mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan paling besar 3.500 kilogram.

Yang dimaksud "kendaraan bermotor barang" meliputi semua kendaraan umum angkutan barang dan mobil barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih besar dari 3.500 kilogram.

Ayat (18)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 57

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 58

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 59

Ayat (1)

Dalam rangka memperhatikan biaya modal kemampuan masyarakat, terhadap Kendaraan Bermotor Umum milik Koperasi diberikan potongan tarif sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).

Ayat (2)

Terhadap Retribusi Terminal untuk kendaraan bermotor milik Koperasi diberikan potongan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Terhadap Retribusi Izin Trayek untuk kendaraan bermotor milik Koperasi diberikan potongan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).

Ayat (7)

Efektifitas pengendalian lalu lintas tercermin dengan berkurangnya perbandingan volume lalu lintas kendaraan dengan kapasitas jalan dari 0,9 (nol koma sembilan) menjadi 0,7 (nol koma tujuh) atau kurang dari 0,7 (nol koma tujuh).

Angka 8

Pasal 60

Cukup jelas.

- Angka 9
Pasal 61
Cukup jelas.
- Angka 10
Pasal 62
Cukup jelas.
- Angka 11
Pasal 63
Cukup jelas.
- Angka 12
Pasal 64
Cukup jelas.
- Angka 13
Pasal 65
Cukup jelas.
- Angka 14
Pasal 83
Cukup jelas.
- Angka 15
Pasal 86
Cukup jelas.
- Angka 16
Pasal 129
Cukup jelas.
- Angka 17
Pasal 141
Cukup jelas.
- Angka 18
Cukup jelas.
- Angka 19
Pasal 145
Cukup jelas.
- Angka 20
Pasal 146 A
Cukup jelas.
- Pasal II
Cukup jelas.

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

A. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Dihapus.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T PURNAMA

**LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH**

C. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KELAUTAN DAN PERTANIAN

| | | | |
|----|---|----|---------------------|
| a. | Pemeriksaan kesehatan ternak potong/unggas di Rumah Potong Hewan: | | |
| | 1. sapi, kerbau, kuda | Rp | 4.000/ekor |
| | 2. babi | Rp | 5.000/ekor |
| | 3. babi adat | Rp | 2.500/ekor |
| | 4. kambing, domba dan hewan kecil lainnya | Rp | 1.000/ekor |
| | 5. unggas | Rp | 25/ekor |
| | 6. pengandangan/pemeriksaan babi | Rp | 2.000/3hari/ekor |
| b. | Pemeriksaan Laboratorium Balai Kesehatan Hewan dan Ikan: | | |
| | 1. Unggas/ikan | | |
| | a) pemeriksaan patologi anatomi | Rp | 5.000/ekor |
| | b) pemeriksaan parasitologi | Rp | 10.000/specimen |
| | c) pemeriksaan bakteriologi | Rp | 30.000/specimen |
| | d) pemeriksaan serologis | Rp | 15.000/organ |
| | e) pemeriksaan histopatologi | Rp | 30.000/organ |
| | f) pemeriksaan bioteknologi | Rp | 200.000/organ |
| | 2. Hewan kecil/besar | | |
| | a) pemeriksaan patologi anatomi | Rp | 30.000/specimen |
| | b) pemeriksaan darah/hematologi | Rp | 30.000/contoh/jenis |
| | c) pemeriksaan kimia darah | Rp | 30.000/contoh/jenis |
| | d) pemeriksaan parasitologi | Rp | 20.000/specimen |
| | e) pemeriksaan bakteriologi/mikologi | Rp | 30.000/specimen |
| | f) pemeriksaan bangkai | Rp | 30.000/specimen |
| | g) pemeriksaan hispatologi | Rp | 30.000/organ |
| | h) pemeriksaan serologis - Brucellosis | Rp | 25.000/specimen |
| | - Toxoplasma | Rp | 50.000/specimen |
| | - FAT Rabies | Rp | 50.000/specimen |
| | - Elisa Rabies | Rp | 35.000/specimen |
| c. | Pemeriksaan Laboratorium Kesmavet: | | |
| | I. FISIKO KIMIA | | |
| | 1.Organoleptik | | |
| | a) organoleptis | Rp | 20.000/contoh/jenis |
| | b) kualitas telur/egg tester | Rp | 25.000/contoh/jenis |

| | | | | |
|--|---|----------|----------------------|---------------------|
| | c) kualitas susu/org Lactodens | Alt test | Rp | 20.000/contoh/jenis |
| | 2. Komposisi | | | |
| | a) Kadar lemak (Soxhlet/Lactoscoppe) | Rp | 50.000/contoh/jenis | |
| | b) Protein (Kjeldah/Lactoscope) | Rp | 50.000/contoh/jenis | |
| | c) Laktose/Lactoscope | Rp | 50.000/contoh/jenis | |
| | d) Bahan Kering tanpa lemak/ Lactoscope | Rp | 50.000/contoh/jenis | |
| | e) Kadar Abu/Furnace | Rp | 50.000/contoh/jenis | |
| | f) Bahan kering, (Oven) | Rp | 50.000/contoh/jenis | |
| | g) Kadar air (Oven) | Rp | 50.000/contoh/jenis | |
| | h) Karbohidrat/by different | Rp | 50.000/contoh/jenis | |
| | i) Karbohidrat/titrasi | Rp | 75.000/contoh/jenis | |
| | j) Vitamin A /C/Titrasi | Rp | 100.000/contoh/jenis | |
| | k) Vitamin A/C/HPLC | Rp | 250.000/contoh/jenis | |
| | 3. Bahan tambahan/pewarna | | | |
| | a). Nitrit ,Nitrat (colorimetric) | Rp | 50.000/contoh/jenis | |
| | b). Nitrit,Nitrat (spectroquant) | Rp | 75.000/contoh/jenis | |
| | 4. Bahan tambahan/pengawet | | | |
| | a) Natrium Benzoat, Asetat (colorimetric) | Rp | 50.000/contoh/jenis | |
| | b) Natrium Benzoat, Asetat (spectroquant) | Rp | 75.000/contoh/jenis | |
| | c) asetat metode colorimetric | Rp | 50.000/contoh/jenis | |
| | d) asetat metode spectroquant | Rp | 75.000/contoh/jenis | |
| | 5. Mineral | | | |
| | Ferum (Fe), Kalium (K), Narium (Na), Kalsium (Ca), Zink (Zn)/SNI AAS | Rp | 100.000/contoh/jenis | |
| | 6. Bahan kimia lainnya | | | |
| | a) Metanil Yellow/colorimetric | Rp | 50.000/contoh/jenis | |
| | b) Rhodamin B/colorimetric | Rp | 50.000/contoh/jenis | |
| | c) Chlorine/colorimetric | Rp | 50.000/contoh/jenis | |
| | d) Formalin/colorimetric | Rp | 50.000/contoh/jenis | |
| | e) Natrium Tetraboraks/colorimetric | Rp | 50.000/contoh/jenis | |

| | | | |
|--|----|----------------------|--|
| | | | |
| 7. Residu Antibiotik | | | |
| a) screening antibiotic/Bioassay | Rp | 100.000/contoh/jenis | |
| b) penecilin,tetracycline, aminoglicocides,macrolides,chlora mphenicol /HPLC | Rp | 200.000/contoh/jenis | |
| c) chloramphenicol,neomycine,fluoroq uinolone kanamycin SEM/Elisa Reader | Rp | 100.000/contoh/jenis | |
| 8. Residu Pestisida Group Organocloring: Lidan dan Aldrin | Rp | 325.000/contoh/jenis | |
| 9. Residu Pestisida Group Organophosphor Dimeatoat dan Diazinon | Rp | 325.000/contoh/jenis | |
| 10. Residu Hormon: | | | |
| Trenbolone Acetat | Rp | 250.000/contoh/jenis | |
| 11. Residu Hormon | | | |
| DES | Rp | 250.000/contoh/jenis | |
| 12. Residu Logam berat | | | |
| a). Pb, Cu, Cd,Sn, Mn(SNI/AAS) | Rp | 75.000/contoh/jenis | |
| b). Hg, As/SNI/AAS | Rp | 100.000/contoh/jenis | |
| 13. Identifikasi spesies | | | |
| a) Daging Sapi, babi, ayam (Eliza/Biokit) | Rp | 200.000/Contoh/jenis | |
| b) Daging sapi, babi,ayam (PCR) | Rp | 250.000/contoh/jenis | |
| II. Mikrobiologi dan Biomolekuler | | | |
| 1.Bakteri | | | |
| a) TPC(SNI) | Rp | 20.000/contoh/jenis | |
| b) caliform (SNI) | Rp | 25.000/contoh/jenis | |
| c) caliform (PCR/Rapid Test) | Rp | 250.000/contoh/jenis | |
| d) E.coli (SNI) | Rp | 50.000/contoh/jenis | |
| e) E.coli (PCR/Rapid test) | Rp | 250.000/contoh/jenis | |
| f) Staphylococcus aureus (SNI) | Rp | 75.000/contoh/jenis | |
| g) Staphylococcus aureus (PCR/Rapid Test) | Rp | 250.000/contoh/jenis | |
| h) Salmonella spp (SNI,) | Rp | 100.000/contoh/jenis | |
| i) Salmonella (PCR,Rapid Test) | Rp | 250.000/contoh/jenis | |
| j) Enterococci (SNI) | Rp | 50.000/contoh/jenis | |
| k) Enterococci (PCR/Rapid Test) | Rp | 250.000/contoh/jenis | |

| | | |
|--|----|----------------------------|
| l) listeria spp (SNI) | Rp | 150.000/contoh/jenis |
| m) listeria ,spp (PCR/Rapid Test) | Rp | 250.000/contoh/jenis |
| n) Clostridium perfringens(SNI) | Rp | 150.000/ contoh/jenis |
| o) Clostridium perfringens (PCR/Rapid Test) | Rp | 250.000/ contoh/jenis |
| p) Compylobacter spp(SNI) | Rp | 150.000/ contoh/jenis |
| q) Compylobacter spp (PCR/Rapid Test) | Rp | 250.000/ contoh/jenis |
| r) Bacillus antrhacis(SNI) | Rp | 150.000/ contoh/jenis |
| s) Bacillus antrhacis (PCR/Rapid Test) | Rp | 250.000/ contoh/jenis |
| t) Yersinia spp(SNi) | Rp | 150.000/ contoh/jenis |
| u) Yersinia spp(PCR/Rapid Test) | Rp | 250.000/ contoh/jenis |
| v) Swab test/Teknik Uji 16/3*0/1/08 | | Sesuai tarif parameter Uji |
| 2. Parasitologi | | |
| Ectoparasite/Microscopic | Rp | 50.000/contoh/jenis |
| 3. Jamur | | |
| a) kapang,/Molds dan kamir /Yeast (SNI) | Rp | 50.000/contoh/jenis |
| b) kapang,/Molds dan kamir /Yeast (PCR/Rapid Test) | Rp | 250.000/contoh/jenis |
| 4. Sel Somatic/Breed | | |
| Somatic cell (Breed) | Rp | 50.000/contoh/jenis |
| III. HERKEURING | | |
| 1. Pangan Asal Hewan Impor | | |
| a. Daging (sapi/kerbau/domba/unggas) | Rp | 450.000/ contoh/jenis |
| b. Jerohan | Rp | 450.000/ contoh/jenis |
| c. Olahan (daging/susu/telur) | Rp | 450.000/ contoh/jenis |
| 2. Pangan Asal Hewan local | | |
| a. Daging (sapi/kerbau/domba/unggas) | Rp | 400.000/ contoh/jenis |
| b. Jerohan | Rp | 400.000/ contoh/jenis |
| c. Olahan (daging/susu/telur) | Rp | 400.000/ contoh/jenis |
| d. Pemakaian Fasilitas/Peralatan Peternakan | | |
| 1. Pemakaian Aula Taman Ternak | Rp | 100.000 / hari |
| 2. Pemakaian Asrama Taman Ternak | | |
| a. Non AC | Rp | 50.000/ kamar/hari |
| b. AC | Rp | 120.000/kamar/hari |

| | | | |
|--|--|----|------------------------------|
| | 3. Pemakaian Rumah Observasi Rabies: | | |
| | a) observasi hewan penular rabies | Rp | 10.000/ekor/5 hari |
| | b) pemeliharaan hewan penular rabies yang diadopsi | Rp | 20.000/ekor/hari |
| | c) biaya eliminasi dan penguburan | Rp | 100.000/ekor |
| | d) pemeliharaan hewan setelah observasi | Rp | 15.000/ekor/hari |
| | 4. Pemakaian Tempat Penampungan dan Pemotongan Unggas: | | |
| | a) pemakaian fasilitas penampungan | Rp | 400.000/kdg/bln |
| | b) pemakaian fasilitas pemotongan | Rp | 50/ ekor |
| | e. Pemeriksaan Pos/Klinik Kesehatan Hewan: | | |
| | 1. pemeriksaan kesehatan hewan kecil | Rp | 20.000/ekor |
| | 2. pemeriksaan dan pengobatan hewan kecil | Rp | 50.000/ekor |
| | 3. pemeriksaan kesehatan hewan besar | Rp | 15.000/ekor |
| | 4. pemeriksaan dan pengobatan hewan besar | Rp | 40.000/ekor |
| | 5. operasi kecil | Rp | 75.000/ekor |
| | 6. operasi besar | Rp | 200.000/ekor |
| | f. Pemakaian Fasilitas/Sarana dan Prasarana Perikanan: | | |
| | 1. Pemakaian kios pengecer di kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) | Rp | 15.000/m ² /bulan |
| | 2. Pemakaian kios Pujaseri di kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Angke : | Rp | 15.000/m ² /bulan |
| | 3. Pemakaian kios alat perikanan di kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Angke dan Pulau Pramuka Kepulauan Seribu . | Rp | 15.000/m ² /bulan |
| | 4. Pemakaian kantor di kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Angke | Rp | 15.000/m ² /bulan |
| | 5. Pemakaian gudang alat perikanan di kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Angke. | Rp | 15.000/m ² /bulan |
| | 6. Pemakaian Tempat Pengepakan Ikan di kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Angke. | Rp | 24.000/m ² /bulan |

| | | | |
|--|---|----|--------------------------------|
| | 7. Pemakaian gudang garam di kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Angke. | Rp | 15.000/m ² /bulan |
| | 8. Pemakaian fasilitas Tempat Pengolahan Ikan di Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT) Muara Angke. | Rp | 100.000/m ² /bulan |
| | 9. Pemakaian fasilitas tempat penjualan/penampungan ikan | Rp | 7.000/m ² /bulan |
| | 10. Pemakaian fasilitas lahan untuk usaha budidaya perikanan di Balai Benih Ikan (BBI) | Rp | 1.000/m ² /tahun |
| | 11. Pemakaian fasilitas kolam di Balai Beni Ika((BBI) | Rp | 300/m ² /bulan |
| | 12. Pemakaian fasilitas lahan di PPHP Cengkareng | Rp | 7.000 /m ² /tahun |
| | 13. Pemakaian fasilitas kios ikan hias di PPHP Cengkareng | Rp | 7.000/m ² /bulan |
| | 14. Pemakaian fasilitas kios ikan hias di BBI Ciganjur | Rp | 5.000/m ² /bulan |
| | 15. Pas Masuk/Retribusi di kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Angke | | |
| | a) sepeda motor | Rp | 2.000/hari |
| | b) bajaj | Rp | 2.000/hari |
| | c) mobil | Rp | 4.000/hari |
| | d) truk/bis | Rp | 6.000/hari |
| | 16. Pemakaian tanah di kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Angke untuk: | | |
| | a) Gudang alat perikanan, pengolahan ikan, bengkel, pabrik es, cool storage | Rp | 24.000/m ² /tahun |
| | b) SPBU, restoran dan depot es | Rp | 24.000/m ² /tahun |
| | c) Dock Kapal | Rp | 12.000/m ² /tahun |
| | 17. Pemakaian alur docking untuk Kapal Perikanan di kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Angke: | | |
| | a) sampai dengan 10 GT | Rp | 30.000/kapal/satu kali docking |
| | b) lebih dari 10 GT sampai dengan 20 GT | Rp | 40.000/kapal/satu kali docking |
| | c) lebih dari 20 GT sampai dengan 30 GT | Rp | 50.000/kapal/satu kali docking |

| | | | |
|--|--|----|---------------------------------|
| | d) lebih dari 30 GT sampai dengan 50 GT | Rp | 75.000/kapal/satu kali docking |
| | e) lebih dari 50 GT | Rp | 100.000/kapal/satu kali docking |
| | 18. Pemakaian alur docking untuk Kapal Bukan Perikanan di kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Angke: | | |
| | a) sampai dengan 10 GT | Rp | 50.000/kapal/satu kali docking |
| | b) lebih dari 10 GT sampai dengan 20 GT | Rp | 75.000/kapal/satu kali docking |
| | c) lebih dari 20 GT sampai dengan 30 GT | Rp | 100.000/kapal/satu kali docking |
| | d) lebih dari 30 GT sampai dengan 50 GT | Rp | 125.000/kapal/satu kali docking |
| | e) lebih dari 50 GT | Rp | 200.000/kapal/satu kali docking |
| | 19. Pemakaian fasilitas docking kapal untuk Kapal Perikanan di kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Angke dan Pulau Seribu berukuran: | | |
| | a) sampai dengan 10 GT | Rp | 20.000/kapal/satu kali docking |
| | b) lebih dari 10 GT sampai dengan 20 GT | Rp | 30.000/kapal/satu kali docking |
| | c) lebih dari 20 GT sampai dengan 30 GT | Rp | 45.000/kapal/satu kali docking |
| | d) lebih dari 30 GT sampai dengan 50 GT | Rp | 70.000/kapal/satu kali docking |
| | e) lebih dari 50 GT | Rp | 100.000 kapal/satu kali docking |
| | 20. Pemakaian fasilitas docking kapal untuk Kapal Bukan Perikanan di kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Angke berukuran: | | |
| | a) sampai dengan 20 GT | Rp | 60.000/kapal/satu kali docking |
| | b) lebih dari 20 GT sampai dengan 30GT | Rp | 85.000/kapal/satu kali docking |
| | c) lebih dari 30 GT sampai dengan 50GT | Rp | 110.000/kapal/satu kali docking |
| | d) lebih dari 50 GT | Rp | 150.000/kapal/satu kali docking |
| | 21. Pemakaian Kios Pengecer Ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pasar Ikan, Kalibaru, Cilincing dan Kamal Muara. | Rp | 2.500/m ² /bulan |

| | | | |
|--|--|------------------------|----------------|
| | 22. Pemakaian tanah di Taman Promosi Hasil Perikanan (TPHP) Cengkareng. | Rp | 7.000/m2/bulan |
| | 23. Pemakaian Kios ikan dipusat Budidaya Perikanan (pusdakan) Ciganjur | Rp | 5.000/m2/bulan |
| | 24. Penggunaan fasilitas Rumah Jaga Pembudidayaan Ikan Di pusat Budidaya Perikanan (Pusdakan) | Rp | 2.000/m2/bulan |
| | 25. Pemakaian tempat Penitipan kendaraan di Kawasan Tempat Promosi Hasil Perikanan (TPHP) Cengkareng | | |
| | a) Motor | Rp | 1.000/parkir |
| | b) Mobil | Rp | 2.000/parkir |
| | 26. Pemakaian tempat pendaratan kapal di kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Angke. | | |
| | 1. Hari ke 1 (satu) sampai dengan hari ke 2 (dua): | | |
| | a) lebih dari 5 GT sampai dengan 10 GT | Rp 4.000/kapal/ 24 jam | |
| | b) lebih dari 10 GT sampai dengan 20 GT | Rp 8.000/kapal/ 24 jam | |
| | c) lebih dari 20 GT | Rp 12.000/kapal/24 jam | |
| | 2. Hari ke 3 (tiga) sampai dengan hari ke 5 (lima) : | | |
| | a) lebih dari 5 GT sampai dengan 10 GT | Rp 4.500/kapal/24 jam | |
| | b) lebih dari 10 GT sampai dengan 20 GT | Rp 8.500/kapal/24 jam | |
| | c) lebih dari 20 GT | Rp 13.000/kapal/24 jam | |
| | 3. Hari ke 6 (enam) sampai dengan hari ke 9 (sembilan): | | |
| | a) lebih dari 5 GT sampai dengan 10 GT | Rp 5.000/kapal/24 jam | |
| | b) lebih dari 10 GT sampai dengan 20 GT | Rp 9.000/kapal/24 jam | |
| | c) lebih dari 20 G | Rp 14.000/kapal/24 jam | |
| | 4. Hari ke 10 (sepuluh) keatas : | | |
| | a) lebih dari 5 GT sampai dengan 10 GT | Rp 5.500/kapal/24 jam | |
| | b) lebih dari 10 GT sampai dengan 20 GT | Rp 9.500/kapal/24 jam | |

| | | | |
|----|--|--------------------------------|---------------|
| | c) lebih dari 20 GT | Rp 14.500/kapal/24 jam | |
| | 27. Lapak pasar grosir | Rp 6.000/m ² /bulan | |
| | 28. Dihapuskan | | |
| | | | |
| g. | Pemakaian Fasilitas Pengujian Mutu Hasil Perikanan: | | |
| | 1. Besar retribusi pemakaian fasilitas pengujian mutu hasil perikanan dihitung berdasarkan perkalian dari volume (ton), harga media pengujian dan Nilai Ekonomis Komoditas (NEK) sebagai berikut : | | |
| | a) udang, lobster 13.75 b) sirip 11 c) paha kodok 5.5 d) tuna 5.5 e) marlin 5.5 f) meka 5.5 g) oil fish 5.5 h) kakap merah/putih 5.5 i) bawal 5.5 j) tenggiri 5.5 k) cakalang 5.5 l) cumi 5.5 m) mahi-mahi 5.5 n) layaran 5.5 o) minyak ikan 5.5 p) olahan teri 5.5 q) hiu 5.5 r) tulang ikan 5.5 s) ubur-ubur 2.75 t) tepung ikan, tepung rumput laut 2.75 u) Ikan kaleng 2.75 v) kepiting, rajungan, kekerangan 2.75 w) kulit ikan 2.75 x) ikan dan produk lainnya 2.75 y) kerupuk 1.65 z) ikan kering, asin 0.55 aa) rumput laut 0.55 | | |
| | 2. Harga media pengujian sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) sebesar | Rp | 9.000 |
| | 3. Pengujian Mikrobiologi: | | |
| | a) Total Plate Count (TPC) | Rp | 30.000/contoh |

| | | | |
|----|--|----|-------------------|
| | b) Escherichia coli (E Coli) | Rp | 75.000/contoh |
| | c) Salmonella | Rp | 100.000/contoh |
| | d) Vibrio cholerae | Rp | 150.000/contoh |
| | e) Staphylococcus aureus | Rp | 200.000/contoh |
| | f) Listeria Monocytogenes | Rp | 200.000/contoh |
| | g) Mikrobiologi dengan PCR Real Team | Rp | 175.000/cth/prmtr |
| | h) Chlostridium botulinum | Rp | 200.000/contoh |
| | i) Chlostridium perfringens | Rp | 200.000/contoh |
| 4. | Pengujian Kimia | | |
| | a) Garam | Rp | 30.000/contoh |
| | b) Air | Rp | 25.000/contoh |
| | c) Abu total | Rp | 25.000/contoh |
| | d) Abu tak larut dalam asam | Rp | 25.000/contoh |
| | e) Kadar Protein | Rp | 50.000/contoh |
| | f) Kadar Harbohidrat | Rp | 50.000/contoh |
| | g) Kadar Lemak Total | Rp | 50.000/contoh |
| 5. | Pengujian Organoleptik (ikan segar): | | |
| | a) Sensory test/organoleptik | Rp | 25.000/contoh |
| | b) Uji Parasit | Rp | 30.000/contoh |
| | c) Filthy | Rp | 30.000/contoh |
| | d) Uji Bobot Tuntas | Rp | 30.000/contoh |
| | e) Uji Suhu Pusat | Rp | 25.000/contoh |
| 6. | Pengujian tambahan: | | |
| | a) uji antibiotik (metode HPLC) | Rp | 250.000/cth/prmtr |
| | b) uji antibiotic dgn LC MS-MS | Rp | 500.000/cth/prmtr |
| | c) uji antibiotic dgn Elisa Test | Rp | 250.000/cth/prmtr |
| | d) uji Pb dengan AAS | Rp | 80.000/cth/prmtr |
| | e) uji Cd dengan AAS | Rp | 80.000/cth/prmtr |
| | f) uji Hg dengan AAS | Rp | 80.000/cth/prmtr |
| | g) uji Cu dengan AAS | Rp | 80.000/cth/prmtr |
| | h) uji histamin dengan spektroflurometer | Rp | 90.000/cth/prmtr |
| | i) uji histamin dengan HPLC Flourense | Rp | 150.000/cth/prmtr |
| | j) uji zat warna secara kualitatif | Rp | 40.000 cth/prmtr |
| | k) uji zat pengawet borax | Rp | 40.000 cth/prmtr |

| | | | |
|----|---|----|-----------------------------|
| | l) uji pestisida secara chromatography | Rp | 300.000/cth/prmtr |
| | m) uji pengawet formalin | Rp | 30.000 cth/prmtr |
| | n) Uji Pestisida secara Elisa Test | Rp | 250.000/cth/prmtr |
| | o) Uji Toksin (PSP dengan Elisa Test) | Rp | 250.000/cth/prmtr |
| | p) Uji Total Volatile Base (TVB) metode Destilasi | Rp | 250.000/cth/prmtr |
| | q) Uji Total Volatile Base (TVB) metode Conway | Rp | 50.000/cth/prmtr |
| | r) Uji Tri Metil Amine (TMA) metode Conway | Rp | 50.000/cth/prmtr |
| | | | |
| h. | Pemakaian Sarana Pengelolaan Perikanan | | |
| | 1. pemakaian gedung serbaguna | Rp | 250.000/hr |
| | 2. pemakaian fasilitas gedung promosi hasil perikanan | Rp | 5.000/m ² /bulan |
| | 3. pemakaian work shop | Rp | 5.000/m ² /bulan |
| | 4. pemakaian penginapan | Rp | 50.000/hari/kamar |
| | | | |
| i. | pemakaian kios promosi bunga: | | |
| | 1. kios ukuran 9 m ² | Rp | 300.000/kios/bulan |
| | 2. kios ukuran 12 m ² | Rp | 350.000/kios/bulan |
| | 3. kios ukuran 16 m ² | Rp | 425.000/kios/bulan |
| | | | |
| j. | pemakaian los promosi bunga | Rp | 1.000/ m ² /hari |
| | | | |
| k. | pemakaian kios terbuka promosi bunga | | |
| | 1. kios terbuka ukuran 36 m ² | Rp | 185.000/kios/bulan |
| | 2. kios terbuka ukuran 48 m ² | Rp | 225.000/kios/bulan |
| | | | |
| l. | pemakaian fasilitas promosi bunga | | |
| | 1. parkir mobil penumpang | Rp | 2.000/ sekali parkir |
| | 2. parkir mobil barang | Rp | 3.000/ sekali parkir |
| | 3. parkir motor | Rp | 1.000/ sekali parkir |
| | 4. toilet | Rp | 1.000/ sekali masuk |
| | 5. space iklan | Rp | 6.000/m ² /bulan |

| | | | |
|----|---|----|------------------------------|
| | 6. pemakaian sarana | | |
| | a) Ruang pertemuan | Rp | 500.000/hari |
| | b) Peralatan | Rp | 5.000/unit/hari |
| | 7. Pengalihan Hak Pemakaian/Pengelolaan Kios milik Pemda | Rp | 10.800.000/kios |
| m. | pemakaian sarana penyimpanan promosi bunga pemakaian Cold Storage | Rp | 75.000/m ³ /bulan |
| n. | pemakaian lahan usaha promosi penangkar bibit | Rp | 1.000/m ² /bulan |
| o. | pemakaian lahan kebun bibit: | | |
| | 1. untuk produksi | Rp | 3.000.000/ha/tahun |
| | 2. untuk promosi dan produksi | Rp | 4.000.000/ha/tahun |
| p. | pemakaian green house/late house : | | |
| | 1. di pusat promosi | Rp | 5.000/m ² /bulan |
| | 2. di kebun bibit | | |
| | a) atap paronet | Rp | 1.750 /m ² /bln |
| | b) atap fiber | Rp | 2.250 /m ² /bln |
| q. | pemakaian lahan Taman Anggrek Ragunan : | | |
| | 1. pemakaian lahan taman anggrek ragunan | Rp | 400.000/kav/bulan |
| | 2. masuk kawasan taman anggrek ragunan: | | |
| | a) mobil | Rp | 2.000/mobil/skl masuk |
| | b) motor | Rp | 1.000/mobil/skl masuk |
| | c) orang | Rp | 1.000/orang/skl masuk |
| r. | pemakaian hasil fasilitas perlindungan tanaman: | | |
| | 1. Klinik tanaman | | |
| | a) konsultasi | Rp | 7.500/kunjungan |
| | b) pemeriksaan sampel (nama) | Rp | 15.000/contoh |

| | | | |
|----|---|----|----------------------------|
| | c) pemeriksaan sampel (penyakit) | Rp | 50.000/contoh |
| 2. | Jasa pengendalian organisme | | |
| | a) perawatan/pemangkasan tanaman | Rp | 10.000/pohon |
| | b) penyemprotan tanaman buah | Rp | 10.000/pohon |
| | c) penyemprotan tanaman hias | Rp | 5.000/m ² |
| | d) infus tanaman | Rp | 5.000/pohon |
| | | | |
| s. | pemakaian kios olahan pangan | Rp | 9.000/m ² /bln |
| | | | |
| t. | Pemakaian Pusat Latihan Pertanian Klender dan Fasilitasnya | | |
| | 1. sewa ruang pertemuan (kapasitas 60 orang) | Rp | 300.000/hari |
| | 2. sewa ruang pertemuan (kapasitas 500 orang) | Rp | 1.000.000/hari |
| | 3. penggunaan alat pengolahan | | |
| | a) alat penepung | Rp | 1.200/kg |
| | b) alat pengolahan instan | Rp | 13.000/kg |
| | c) alat pengolahan sari buah (cup 240 ml) | Rp | 200/cup |
| | | | |
| u. | pemakaian tempat penimbunan hasil hutan | | |
| | 1. ruang tertutup | Rp | 1.000/m ² /hari |
| | 2. ruang terbuka | Rp | 500/m ² /hari |
| | | | |
| v. | Pemakaian sarana/fasilitas kehutanan | | |
| | - forklift | Rp | 250.000/hari |
| | | | |
| w. | Pemakaian peralatan pengeringan, pengawetan dan pengolahan kayu | | |
| | 1. Pengeringan kayu | Rp | 200.000/m ³ |
| | 2. Pengawetan kayu | Rp | 200.000/m ³ |
| | 3. Pengolahan kayu | | |
| | a) penyerutan kayu | Rp | 60.000/m ³ |
| | b) penggergajian | Rp | 60.000/m ³ |
| | | | |

| | | | | |
|----|--|----|----------------------|--|
| x. | Pemakaian peralatan untuk pengujian pengawetan dan pengeringan kayu: | | | |
| | 1. Pengawetan | Rp | 3.000/m ³ | |
| | 2. Pengeringan | Rp | 2.000/m ³ | |
| | 3. Jenis/kualitas kayu | Rp | 3.000/m ³ | |
| y. | Pelayanan pemakaian laboratorium uji mutu pertanian: | | | |
| | 1. uji organopoleptik: | | | |
| | a) sayur-sayuran segar | Rp | 20.000/contoh | |
| | b) buah-buahan segar | Rp | 20.000/contoh | |
| | c) hasil olahan: | | | |
| | 1)). dalam kaleng | Rp | 20.000/contoh | |
| | 2)). kemasan lain | Rp | 20.000/contoh | |
| | 2. uji komposisi nutris | | | |
| | a) kadar lemak/SNI Soklet | Rp | 100.000/contoh | |
| | b) kadar serat/SNI Ekstrasi | Rp | 60.000/contoh | |
| | c) kadar protein/SNI Soklet | Rp | 75.000/contoh | |
| | d) kadar abu/SNI Soklet | Rp | 50.000/contoh | |
| | e) kadar air/SNI Oven | Rp | 50.000/contoh | |
| | f) kadar total gula/HPLC | Rp | 250.000/contoh | |
| | g) kadar karbohidrat/SNI Luft Scrol | Rp | 60.000/contoh | |
| | h) kadar fruktosa/HPLC | Rp | 300.000/contoh | |
| | i) kadar glukosa/HPLC | Rp | 300.000/contoh | |
| | j) Sachrosa/HPLC | Rp | 300.000/contoh | |
| | k) vitamin C/SNI Titrasi | Rp | 75.000/contoh | |
| | l) vitamin B/HPLC | Rp | 300.000/contoh | |
| | m) vitamin B12/HPLC | Rp | 300.000/contoh | |
| | n) vitamin A/HPLC | Rp | 300.000/contoh | |
| | o) vitamin D/HPLC | Rp | 300.000/contoh | |
| | 3. uji residu pestisida | | | |
| | a) metode GC (Gol organophosphate, organochlorin, piretroid atau golongan lain | Rp | 100.000/cnth/gol | |
| | b) metode HPLC | Rp | 1.000.000/cnth/gol | |
| | 4. uji mikrobiologi: | | | |

| | | |
|--|----|------------------|
| a) Escherisicia coli | Rp | 60.000/contoh |
| b) Total plate count (TPC) | Rp | 50.000/contoh |
| c) Salmonella | Rp | 75.000/contoh |
| d) Stafilococcus | Rp | 75.000/contoh |
| e) MPN Coliform | Rp | 50.000/contoh |
| 5. uji kandungan mineral dan logam berat | | |
| a) Besi (Fe)/AAS | Rp | 150.000/contoh |
| b) Kalsium (Ca)/AAS | Rp | 150.000/contoh |
| c) Seng (Zn)/AAS | Rp | 150.000/contoh |
| d) Tembaga (Cu)/AAS | Rp | 150.000/contoh |
| e) Timbal (Pb)/AAS | Rp | 200.000/contoh |
| f) Cadmium (Cd)/AAS | Rp | 200.000/contoh |
| 6. uji formulasi pestisida | | |
| a) metode tritasi | Rp | 300.000/contoh |
| b) metode HPLC | Rp | 500.000/contoh |
| c) metode GC | Rp | 400.000/contoh |
| 7. Pengujian benih tanaman pangan dan hortikultura | | |
| a) pengujian standar tanaman pangan | | |
| 1)). Padi, jagung | Rp | Rp 15.000/contoh |
| 2)). Kacang tanah, kacang hijau,kacang kedelai | Rp | Rp 15.000/contoh |
| b) pengujian ulang tanaman pangan | | |
| 1)). Padi, jagung | Rp | Rp 15.000/contoh |
| 2)). Kacang tanah,kacang hijau,kacang kedelai | | |
| c) pengujian standar tanaman horti | Rp | Rp 15.000/contoh |
| 1)). Kacang-kacangan | Rp | Rp 15.000/contoh |
| 2)). Sayuran buah | Rp | Rp 15.000/contoh |
| 3)). Sayuran buah (pengujian bakteri) | Rp | 80.000/contoh |
| 8. Uji bahan tambahan | | |
| a) pemanis buatan/HPLC | Rp | 300.000/contoh |
| b) pemutih (chlorin)/SNI | Rp | 100.000/contoh |

| | | | |
|-----|--|----|-----------------------------|
| z. | Pengukuran dan pengujian hasil hutan: | | |
| | Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (5) ditetapkan sebagai berikut : | | |
| | 1. Kayu Bulat | Rp | 5.000/m ³ |
| | 2. Kayu Olahan | Rp | 10.000/m ³ |
| | 3. Rotan | Rp | 10.000/ton |
| | 4. Getah/Damar | Rp | 50.000/ton |
| | | | |
| aa. | pemakaian fasilitas kehutanan di kota/hutan wisata : | | |
| | 1. Masuk hutan kota/hutan wisata: | | |
| | a) mobil | Rp | 2.000/mobil/sekali masuk |
| | b) motor | Rp | 1.000/motor/sekali masuk |
| | c) orang | Rp | 1.000/org/sekali masuk |
| | 2. Sewa lapak tanaman hias | Rp | 1.000/m ² /bulan |
| | 3. Pemanfaatan Jasa Langsung Hutan/ Hutan Kota: | | |
| | a) Pre-wedding | Rp | 250.000/hari |
| | b) Shooting | Rp | 750.000/hari |
| | | | |
| bb. | pemakaian tempat pelelangan ikan dihapuskan | | |
| cc. | Penjualan benih ikan disesuaikan dengan harga pedoman | | |
| dd. | Penjualan bibit ternak disesuaikan dengan harga pedoman | | |
| ee. | Penjualan bibit/hasil kebun disesuaikan dengan harga pedoman | | |
| ff. | Penjualan produk biopestisida dan agens hayati disesuaikan dengan harga Pedoman | | |

D. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEBUDAYAAN DAN PERMUSEUMAN

| | | | |
|----|--|----|----------------------|
| a. | Tempat untuk Rekreasi : | | |
| | 1.Museum : | | |
| | a) dewasa / umum | Rp | 5.000/orang |
| | b) mahasiswa | Rp | 3.000/orang |
| | c) anak-anak /pelajar | Rp | 2.000/orang |
| | d) rombongan Tamu Negara/Pemerintah | Rp | 0/orang |
| | e) rombongan (dewasa/ umum, mahasiswa, anak-anak /pelajar minimal 30 orang) diberikan potongan 25%) | | |
| | 2.Pelataran Cawan Monumen Nasional : | | |
| | a) dewasa / umum | Rp | 5.000/orang |
| | b) mahasiswa | Rp | 3.000/orang |
| | c) anak-anak /pelajar | Rp | 2.000/orang |
| | d) rombongan Tamu Negara/Pemerintah | Rp | 0/orang |
| | e) rombongan dengan jumlah minimal 30 (tiga puluh) orang diberikan keringanan 25% (dua puluh lima persen). | | |
| | 3.Pelataran Puncak Monumen Nasional : | | |
| | a) dewasa / umum (17 tahun keatas) | Rp | 10.000/orang |
| | b) mahasiswa | Rp | 5.000/orang |
| | c) anak-anak /pelajar | Rp | 2.000/orang |
| | d) rombongan Tamu Negara/Pemerintah | Rp | 0/orang |
| | e) rombongan dengan jumlah minimal 30 (tiga puluh) orang diberikan keringanan 25% (dua puluh lima persen). | | |
| | 4. Taman Arkeologi Onrust : | | |
| | a) Dewasa/ umum | Rp | 5000/ orang |
| | b) Mahasiswa | Rp | 3000/orang |
| | c) anak-anak /pelajar | Rp | 2000/orang |
| | d) rombongan Tamu Negara/Pemerintah | Rp | 0/orang |
| | e) Rombongan dengan jumlah minimal 30 (tiga puluh) orang diberikan keringanan 25% (dua puluh lima persen) | | |
| | 5. Pemakaian lokasi untuk shooting film, Rekaman dan sejenisnya | Rp | 1.500.000,00/hari |
| b. | Pemakaian plaza, ruangan dan taman | Rp | 1.000.000/hari |
| c. | Pemakaian ruang serbaguna : | | |
| | 1. Museum | Rp | 1.000.000/8 jam |
| | 2. Balai Latihan Kesenian : | | |
| | Umum | Rp | 500.000/hari |
| | 3. Pemakaian Gedung Nyi Ageng | Rp | - |
| d. | Pemakaian Gedung Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki untuk pertunjukan kesenian : | | |
| | 1. Gedung Teater Kecil | Rp | 3.000.000/pemakaian |
| | 2. Gedung Teater Besar | Rp | 30.000.000/pemakaian |

| | | |
|---|----|----------------------|
| 3. Gedung Graha Bhakti Budaya | Rp | 5.000.000/ pemakaian |
| 4. Gedung Kesenian Jakarta | Rp | 5.000.000/pemakaian |
| 5. Gedung Miss Tjitjih | Rp | 0,-/hari |
| 6. Gedung Wayang Orang Bharata | Rp | 0,-/hari |
| 7. Laboratorium Tari Condet | Rp | 0,-/hari |
| 8. Perkampungan Budaya Betawi | Rp | 0,-/hari |
| 9. Gedung Balai Latihan Kesenian | Rp | 0,-/ pemakaian |
| 10.Untuk kegiatan pertunjukan kesenian yang bersifat sosial dan mendapat rekomendasi dari pejabat instansi terkait, diberikan keringanan tarif sebesar 50% (lima puluh persen). | | |
| 11.Untuk kegiatan pertunjukan kesenian yang mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah dapat dibebaskan dari tarif pelayanan. | | |

F. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERHUBUNGAN

| | | | |
|----|---|----|---|
| a. | Pengujian kendaraan bermotor: | | |
| | 1. mobil barang, mobil bus dan kendaraan khusus kereta tempel/gandengan | Rp | 87.000/kendaraan/ 6 bulan Rp 87.000/kendaraan/ 6 bulan |
| | 2. mobil penumpang umum kendaraan jenis keempat/kendaraan bajai | Rp | 71.000/kendaraan/ 6 bulan |
| | 3. mobil penumpang umum | Rp | 62.000/kendaraan/ 6 bulan |
| | 4. pengujian ulang atas keputusan hasil uji yang dinyatakan tidak lulus uji tidak dipungut retribusi pengujian kendaraan bermotor. | | |
| | 5. apabila hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada angka 4 tetap tidak lulus uji, diberikan kesempatan untuk pengujian ulang dan diperlakukan sebagai pemohon baru. | | |
| | 6. kendaraan yang berada di Jakarta untuk menumpang uji dikenakan retribusi sebesar 1 kali tarif kendaran uji. | | |
| | 7. Penyediaan Sarana Pangkalan Kendaraan Umum | | |
| | a) Sarana pangkalan taksi | Rp | 5.000/kendaraan/bulan |
| | b) Sarana pangkalan kajen IV | Rp | 4.000/kendaraan/bulan |
| b. | Pemakaian terminal penumpang mobil bus dan terminal mobil barang: | | |
| | 1. mobil bus antarkota di terminal penumpang: | | |
| | a) mobil bus non ekonomi | Rp | 2.000/kendaraan/sekali masuk |
| | b) mobil bus ekonomi (bus lambat) | Rp | 1.000/kendaraan/sekali masuk |
| | 2. mobil bus dalam kota diterminal penumpang: | | |
| | a) mobil bus besar | Rp | 500/kendaraan/sekalim asuk |
| | b) mobil bus tingkat/gandeng/tempel | Rp | 500/kendaraan/sekali masuk |
| | c) mobil bus sedang | Rp | 500/kendaraan/sekali masuk |
| | d) mobil bus kecil | Rp | 500/kendaraan/sekali masuk |
| | 3. masuk pelataran di terminal mobil barang: | | |
| | a) truck, traktor tanpa kereta tempelan | Rp | 2.000/sekali masuk |
| | b) tronton | Rp | 2.000/sekali masuk |
| | c) gandengan | Rp | 2.000/sekali masuk |

| | | | |
|----|--|----|---------------------------------|
| | d) kereta | Rp | 2.000/sekali masuk |
| | e) light truck | Rp | 1.000/sekali masuk |
| | f) truck kecil | Rp | 1.000/sekali masuk |
| | 4. tempat menginap di terminal mobil barang: | | |
| | a) truck, traktor tanpa kereta tempelan | Rp | 5.000/kendaraan/hari/malam |
| | b) tronton | Rp | 5.000/kendaraan/hari/malam |
| | c) gandengan | Rp | 3.000/kendaraan/hari/malam |
| | d) kereta | Rp | 3.000/kendaraan/hari/malam |
| | e) light truck | Rp | 2.000/kendaraan/hari/malam |
| | f) truck kecil | Rp | 2.000/kendaraan/hari/malam |
| | | | |
| c. | Pemakaian fasilitas lainnya di terminal penumpang mobil bus: | | |
| | 1. kios pedagang makanan/minuman, majalah/koran di terminal bus antar kota | Rp | 30.000/m ² /bulan |
| | 1. kios pedagang makanan/minuman, majalah/koran di termina bus dalam kota yang berdampingan dengan termina bus antar kota dan pool bus | Rp | 20.000/m ² /bulan |
| | 2. kios pedagang makanan/minuman, majalah/koran di terminal bus dalam kota dan terminal mobil barang | Rp | 15.000/m ² /bulan |
| | 3. peturasan di terminal busantar kota/dalam kota | Rp | 1.000/orang |
| | 4. pemakaian loket karcis kendaraan bus antar kota | Rp | 100.000/perusahaan otobus/bulan |
| | 5. pemakaian fasilitas terminal antar kota (peron) | Rp | 500/orang |
| | | | |
| d. | Pemakaian fasilitas terminal mobil barang; | | |
| | 1. penginapan awak kendaraan | Rp | 5.000/orang/hari |
| | 2. penyimpanan barang | Rp | 15/kg/hari |
| | 3. ruang kantor | Rp | 30.000/m ² /bulan |
| | 4. peturasan | Rp | 1.000/orang |
| | | | |
| e. | Pemakaian fasilitas untuk kendaraan antar jemput dalam areal terminal | Rp | 2.000/kendaraan/2jam |

| | | | |
|----|--|----|------------------------------|
| f. | Pemakaian pool kendaraan | | |
| | 1.mobil bus: | | |
| | a) bus besar | Rp | 3.000/kendaraan/hari |
| | b) bus sedang | Rp | 1.500/kendaraan/hari |
| | c) bus kecil | Rp | 1.000/kendaraan/hari |
| | 2. mobil antar jemput | Rp | 1.000/kendaraan/2 jam |
| g. | Pemakaian mobil derek (atas permintaan pemilik kendaraan): | | |
| | 1.mobil penumpang (sedan, jeep, station wagon), mobil barang (pick up, mobil box, light truck dan sejenisnya) dan mobil bus kecil (mikrolet, APK dan sejenisnya): | | |
| | a) sampai dengan 10 kilo meter | Rp | 20.000/kendaraan |
| | b) 10 kilo meter sampai dengan 20 kilo meter | Rp | 35.000/kendaraan |
| | c) untuk pemakaian lebih dari 20 kilo meter dikenakan tambahan setiap 5 kilo meter berikutnya | Rp | 10.000/kendaraan |
| | 2. mobil bus (bus mikro, bus besar, bus tingkat, bus tempel) dan mobil barang (truck, kereta penarik, tempelan/gandengan, kereta tempelan, kereta gandengan dan kendaraan khusus): | | |
| | a) sampai dengan 10 kilo meter | Rp | 45.000/kendaraan |
| | b) 10 kilo meter s.d 20 kilo meter | Rp | 80.000/kendaraan |
| | c) untuk pemakaian lebih dari 20 kilo meter dikenakan tambahan setiap 5 kilo meter berikutnya | Rp | 20.000/kendaraan |
| | 3. penginapan dan penyimpanan kendaraan yang diderek karena melanggar rambu larang parkir | Rp | 500.000/hari/kendaraan |
| h. | Sewa tanah area pelabuhan milik pemerintah daerah | | |
| | 1. untuk bangunan-bangunan Industri galangan dan dockkapal persewaan tanah pelabuhan | Rp | 50.000/m ² /tahun |
| | 2. untuk bangunan-bangunan industri perusahaan-perusahaan persewaan tanah pelabuhan | Rp | 10.000/m ² /thn |
| | 3. untuk kepentingan lainnya | Rp | 10.000/m ² /tahun |
| i. | Jasa Kepelabuhanan, Kenavigasian dan Perkapalan pada Pelabuhan milik Pemerintah Daerah | | |

| | | | |
|--|--|------|---------------------|
| | 1. Jasa labuh: | | |
| | a) Kapal yang melakukan kegiatan di pelabuhan umum: | | |
| | 1) kapal yang melaksanakan kegiatan niaga: | | |
| | a)kapal angkutan laut luar negeri | US\$ | 20/GT/kunjungan |
| | b) kapal angkutan laut dalam negeri | Rp | 5000/GT/kunjungan |
| | c)kapal pelayaran rakyat/kapal perintis | Rp | 1000/GT/kunjungan |
| | d)kapal melakukan kegiatan tetap di perairan pelabuhan: | | |
| | 1) kapal angkutan laut dalam negeri | Rp | 2.000/GT/bulan |
| | 2) kapal pelayaran rakyat/kapal perintis | Rp | 1.000/GT/bulan |
| | 2) kapal tidak melaksanakan kegiatan niaga: | | |
| | a) kapal angkutan laut luar negeri | US\$ | 5/GT/kunjungan |
| | b) kapal angkutan laut dalam negeri | Rp | 1.000/GT/ kunjungan |
| | c) kapal pelayaran rakyat/kapal perintis | Rp | 500/GT/kunjungan |
| | b) Kapal yang melakukan kegiatan di dermaga untuk kepentingan sendiri dan Terminal khusus: | | |
| | 1) kapal angkutan laut luar negeri | US\$ | 5/GT/kunjungan |
| | 2) kapal angkutan laut dalam negeri | Rp | 5.000/GT/kunjungan |
| | 3) kapal perikanan | Rp | 1.000/GT/kunjungan |
| | 2. Jasa tambat | | |
| | a) kapal yang melakukan kegiatan di pelabuhan umum | | |
| | 1) tambatan dermaga (besi, beton dan kayu) | | |
| | a) kapal angkutan laut luar negeri | US\$ | 0.50/GT/etmal |
| | b) kapal angkatan laut dalam negeri | Rp | 1.000/GT/etmal |
| | c) kapal pelayaran rakyat/kapal perintis | Rp | 500/GT/etmal |
| | 2) tambatan breaststing, dolphin, pelampung | | |
| | a) kapal angkutan laut luar negeri | US\$ | 0.3/GT/etmal |
| | b) kapal angkutan laut dalam negeri | Rp | 500/GT/etmal |
| | c) kapal pelayaran rakyat/kapal perintis | Rp | 200/GT/etmal |
| | 3) tambatan pinggiran/talud | | |
| | a) kapal angkutan laut luar negeri | US\$ | 0.10/GT/etmal |
| | b) kapal angkatan laut dalam negeri | Rp | 1.000/GT/etmal |
| | c) kapal pelayaran rakyat/kapal perintis | Rp | 500/GT/etmal |

| | | | |
|--|--|----|------------------------------|
| | b) kapal yang melaksanakan kegiatan di terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) dan di terminal khusus: | | |
| | 1) kapal yang mengangkut bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri | Rp | 500/GT/etmal |
| | 2) kapal yang mengangkut kepentingan umum 50 % (lima puluh persen) dari pendapatan jasa tambat per GT per etmal. | | |
| | 3.Jasa pelayanan barang | | |
| | a) jasa dermaga dibongkar/dimuat | | |
| | 1) barang yang dibongkar/dimuat melalui pelabuhan umum | | |
| | a) barang ekspor dan impor | Rp | 1.000/ton/m ³ |
| | b) barang antar pulau: | | |
| | 1) garam, pupuk dan barang Bulog (beras dan gula) | Rp | 500/ton/m ³ |
| | 2) barang lainnya | Rp | 500/ton/m ³ |
| | c) hewan | | |
| | 1) kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya | Rp | 1.000/ekor |
| | 2) kambing, babi dan sejenisnya | Rp | 500/ekor |
| | 2) barang yang dibongkar/dimuat melalui terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) dan di pelabuhan khusus | | |
| | a)barang yang merupakan bahan baku hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri | Rp | 0 |
| | b)barang kepentingan umum 50 % (lima puluh persen) dari pendapatan jasa dermaga per ton per m ³ | | |
| | b) Jasa penumpukan | | |
| | 1) gudang tertutup | Rp | 500/ton/m ³ /hari |
| | 2) lapangan | Rp | 500/ton/m ³ /hari |
| | 3) penyimpanan hewan | | |
| | a) kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya | Rp | 200/ekor/hari |
| | b) kambing, babi dan sejenisnya | Rp | 125/ekor/hari |
| | 4. Jasa pelayanan alat | | |
| | - Sewa alat mekanik/Forklif | Rp | 5.000/ton/m ³ |
| | 5. Pelayanan jasa kepelabuhan lainnya | | |
| | a) Pelayanan terminal penumpang kapal laut | | |

| | | | |
|--|---|----|--|
| | 1) terminal penumpang | | |
| | a)) penumpang yang berangkat | Rp | 2.000/orang |
| | b)) pengantar/penjemput | Rp | 2.000/orang/sekali masuk |
| | b) Tanda masuk orang | | |
| | 1) tanda masuk orang | Rp | 1.000/orang/sekali masuk |
| | 2) tanda masuk bulanan | Rp | 25.000/orang/bulan |
| | 3) tanda masuk tetap | Rp | 200.000/orang/tahun |
| | c) Tanda/Pas masuk kendaraan | | |
| | 1) tanda masuk harian | | |
| | a)) pick up, minibus, sedan dan jeep | Rp | 4.000/kendaraan & pengemudi sekali masuk |
| | b)) sepeda motor | Rp | 2.000/kendaraan/sekali masuk |
| | c)) gerobak, cikar, dokar dan sepeda | Rp | 1.000/kendaraan/sekali masuk |
| | 2) tanda masuk tetap | | |
| | a)) pick up, minibus, sedan dan jeep | Rp | 100.000/kendaraan/bulan |
| | | Rp | 1.000.000/kendaraan/tahun |
| | b)) sepeda motor | Rp | 50.000/kendaraan/bulan |
| | | Rp | 500.000/kendaraan/tahun |
| | c)) gerobak, cikar, dokar dan sepeda | Rp | 25.000/kendaraan/bulan |
| | | Rp | 250.000/kendaraan/tahun |
| | 6. Penerimaan jasa perkapalan | | |
| | a) Pemeriksaan dan sertifikat yang berkaitan dengan keselamatan kapal | | |
| | 1) 0 sampai dengan GT 6 | Rp | 5.000/kapal |
| | b) Penerbitan surat tanda kebangsaan kapal/pas kecil | Rp | 500/GT |
| | c) Penelitian dokumen kepelautan dan dokumen kapal selain sertifikat | | |
| | 1) dokumen kepelautan | Rp | 5000/dokumen |
| | 2) dokumen status hukum kapal/pas kecil | Rp | 5000/dokumen |
| | 3) sertifikat keselamatan kapal | Rp | 5000/dokumen |
| | | | |

| | | | |
|----|---|----|-----------------------------------|
| j. | Jasa-jasa pelayanan angkutan sungai, danau dan Penyeberangan. | | |
| | Surat izin mendirikan bangunan diatas air | Rp | 1000/ m ² |
| 3. | Tarif retribusi penumpang kapal cepat | | |
| | a) jarak 0 sampai dengan 20 mil((P. Bidadari, P. Untung Jawa, P. Pari dan P. Lancang) | Rp | 40.000/orang |
| | b) jarak 20 sampai dengan 35 mil (P.Payung, P.Tidung, P.Pramuka, P.Kelapa, dan Resort-Resort) | Rp | 50.000/orang |
| | c) jarak diatas 35 mil(P. Sebira) | Rp | 70.000/orang |
| | | | |
| k. | Izin trayek: | | |
| | 1. mobil bus besar | Rp | 100.000/kendaraan /tahun |
| | 2. mobil bus sedang | Rp | 75.000/kendaraan /tahun |
| | 3. mobil bus kecil | Rp | 50.000/kendaraan /tahun |
| | | | |
| l. | Pengendalian Lalu Lintas | | minimal Rp20.000/kendaraan /masuk |

G. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

| | | | |
|----|--|----|------------------------------|
| a. | Penyelenggaraan pelatihan Hygiene, kesehatan dan keselamatan kerja (Hyperkes) bagi Dokter perusahaan | Rp | 1.000.000/paket/ perorang |
| b. | Jasa pemakaian fasilitas ketenagakerjaan milik Pemerintah Daerah, Balai Higiene Perusahaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (Balai Hiperkes dan KK) : | | |
| | 1. Air limbah cair (fisika dan kimia) | Rp | 500.000/paket |
| | 2. Udara ambien | | |
| | a) NH ₃ | Rp | 95.000/contoh |
| | b) SO ₂ | Rp | 95.000/contoh |
| | c) NO ₂ | Rp | 95.000/contoh |
| | d) O ₃ | Rp | 95.000/contoh |
| | e) CO | Rp | 95.000/contoh |
| | f) Total H-C | Rp | 190.000/contoh |
| | g) Total partikulat | Rp | 120.000/contoh |
| | h) PM ₁₀ | Rp | 190.000/contoh |
| | i) PM _{2,5} | Rp | 190.000/contoh |
| | j) H ₂ S | Rp | 95.000/contoh |
| | k) Pb | Rp | 190.000/contoh |
| | l) Kebisingan | Rp | 75.000/contoh |
| | m) Getaran | Rp | 75.000/contoh |
| | 3. Udara emisi | | |
| | a) Ammonia (NH ₃) | Rp | 410.000/contoh |
| | b) Gas Chlorin (CL ₂) | Rp | 410.000/contoh |
| | c) Hidrogen Clorida (HCL) | Rp | 410.000/contoh |

| | | | |
|----|---------------------------------|----|----------------|
| | d) Hidrogen Fluorida (HF) | Rp | 410.000/contoh |
| | e) Nitrogen Oksida (NO2) | Rp | 410.000/contoh |
| | f) Opasitas | Rp | 410.000/contoh |
| | g) Partikel | Rp | 410.000/contoh |
| | h) Sulfur Dioksida (SO2) | Rp | 410.000/contoh |
| | i) Total Sulfur Tereduksi (H2S) | Rp | 410.000/contoh |
| | j) Air Raksa (Hg) | Rp | 410.000/contoh |
| | k) Arsen (AS) | Rp | 410.000/contoh |
| | l) Antimon (Sb) | Rp | 410.000/contoh |
| | m) Kadmium (Cd) | Rp | 410.000/contoh |
| | n) Seng (Zn) | Rp | 410.000/contoh |
| | o) Timah hitam (Pb) | Rp | 410.000/contoh |
| 4. | Faktor Lingkungan Kerja | | |
| | a) Fisika : Lingkungan Kerja | | |
| | 1) Kebisingan | Rp | 75.000/contoh |
| | 2) Pencahayaan | Rp | 75.000/contoh |
| | 3) Iklim Kerja | Rp | 75.000/contoh |
| | 4) Radiasi sinar UV | Rp | 75.000/contoh |
| | 5) Gelombang Ekektronmagnetik | Rp | 75.000/contoh |
| | 6) Getaran | Rp | 75.000/contoh |
| | b) Kimia lingkungan kerja : | | |
| | 1) Alkohol | Rp | 190.000/contoh |
| | 2) Acrylonitril | Rp | 190.000/contoh |
| | 3) Acrylic acid | Rp | 190.000/contoh |

| | | | |
|--|----------------------|----|----------------|
| | 4) Asam nitrat | Rp | 95.000/contoh |
| | 5) Asam sulfida | Rp | 95.000/contoh |
| | 6) Asam sulfat | Rp | 95.000/contoh |
| | 7) Asam cianid | Rp | 95.000/contoh |
| | 8) Asam clorida | Rp | 95.000/contoh |
| | 9) Ammonia | Rp | 95.000/contoh |
| | 10) Alumunium | Rp | 190.000/contoh |
| | 11) Arsen | Rp | 190.000/contoh |
| | 12) Asbes | Rp | 190.000/contoh |
| | 13) Benzene | Rp | 190.000/contoh |
| | 14) Besi | Rp | 190.000/contoh |
| | 15) Butadien | Rp | 190.000/contoh |
| | 16) Butana | Rp | 190.000/contoh |
| | 17) Cobalt | Rp | 190.000/contoh |
| | 18) Chromium | Rp | 190.000/contoh |
| | 19) Chloroform | Rp | 190.000/contoh |
| | 20) Cadmium | Rp | 190.000/contoh |
| | 21) Debu carbon | Rp | 95.000/contoh |
| | 22) Karbon monoksida | Rp | 95.000/contoh |
| | 23) Karbon dioksida | Rp | 190.000/contoh |
| | 24) Klorin | Rp | 95.000/contoh |
| | 25) Mangan | Rp | 190.000/contoh |
| | 26) Merkuri | Rp | 190.000/contoh |

| | | | |
|--|---------------------------------------|---|----------------|
| | 27) Nikel | Rp | 190.000/contoh |
| | 28) Nitrogen dioksida | Rp | 95.000/contoh |
| | 29) Ozon | Rp | 95.000/contoh |
| | 30) Sulfur dioksida | Rp | 95.000/contoh |
| | 31) Tembaga | Rp | 190.000/contoh |
| | 32) Timbal | Rp | 190.000/contoh |
| | 33) Toluene | Rp | 190.000/contoh |
| | 34) Xylene | Rp | 190.000/contoh |
| | 35) Zink | Rp | 190.000/contoh |
| | 5. Pemeriksaan Kesehatan Kerja | | |
| | a) Pemeriksaan kehilangan Daya dengar | Rp | 40.000/orang |
| | b) Pemeriksaan fungsi paru | Rp | 40.000/orang |
| | c) Pemeriksaankesehatan umum | Rp | 40.000/orang |
| | d) Perpanjangan IMTA | USD100/orang/bulan Dapat dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi. | |

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T PURNAMA

**LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH**

A. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PEKERJAAN UMUM

| | | | |
|----|--|----|--------------------------------------|
| a. | Pemakaian alat-alat besar dan/atau penunjang: | | |
| | 1. Ongkos angkut direksi keet/gudang lapangan (pp) | Rp | 700.000/buah |
| | 2. direksi keet (kontainer) ukuran 1,5m x 4m | Rp | 21.000/hari (paling singkat 30 hari) |
| | 3. direksi keet (kontainer) ukuran 2m x 6 m | Rp | 74.000/hari (paling singkat 30 hari) |
| | 4. gudang lapangan, paling singkat 30 Hari | Rp | 30.000/hari |
| | 5. mesin gilas 1,5 sampai dengan 10 ton,min 2 hari | Rp | 188.000/hari |
| | 6. mesin gilas 10 sampai dengan 18 ton,min 2 hari | Rp | 223.500/hari |
| | 7. dump truck kecil | Rp | 316.000/hari |
| | 8. dump truck besar | Rp | 477.000/hari |
| | 9. excavator kecil,Pemakaian paling singkat 2 hari | Rp | 856.000/hari |
| | 10. excavator besar,Pemakaian paling singkat 2 hari | Rp | 1.500.000/hari |
| | 11. shovel loader,Pemakaian paling singkat 2 hari | Rp | 889.000/hari |
| | 12. Mini excavator, pemakaian paling singkat 2 hari | Rp | 700.000/hari |
| | 13. Low Bed Trailer | Rp | 1.000.000/hari |
| | 14. Dump Truck Tronton | Rp | 1.000.000/hari |
| | 15. Tyre Roller, pemakaian paling singkat 2 hari | Rp | 800.000/hari |
| | 16. Asphalt Finisher, pemakaian paling singkat 2 hari | Rp | 850.000/hari |
| | 17. Dragger Phonton | Rp | 800.000/hari |
| | | | |
| b. | Pemakaian peralatan laboratorium dan mobilisasi: | | |
| | 1. pekerjaan sondir dan pengeboran: | | |
| | a) sondir q.c 150kg/cm ² atau paling dalam 25 m | Rp | 200.000/titik |
| | b) sondir q.c 400kg/cm ² atau paling dalam 25 m | Rp | 1.250.000/titik |
| | c) pengeboran tanah sampai kedalaman paling dalam 10 m | Rp | 500.000/titik |
| | d) pengeboran tanah dengan mesin : | | |
| | 1) sampai dengan 10 m | Rp | 52.500/m |
| | 2) lebih dari 10 m sampai dengan 20 m | Rp | 63.500/m |
| | 3) lebih dari 20 m sampai dengan 30 m | Rp | 74.000/m |
| | 4) lebih dari 30 m sampai dengan 40 m | Rp | 84.250/m |
| | 5) lebih dari 40 m sampai dengan 50 m | Rp | 99.125/m |
| | 6) lebih dari 50 m sampai dengan 60 m | Rp | 120.400/m |
| | 7) lebih dari 60 m sampai dengan 70 m | Rp | 141.750/m |
| | 8) lebih dari 70 m sampai dengan 80 m | Rp | 184.125/m |
| | 2. pengambilan contoh (sample) tanah asli dengan bor tangan maximal kedalaman 10 m | Rp | 232.000/titik |

| | | | |
|--|---|----|----------------|
| | 3. pengambilan contoh tanah dengan bor mesin | Rp | 46.000/contoh |
| | 4. standard penetration test | Rp | 46.000/contoh |
| | 5. pengeboran aspal beton (hotmix) | Rp | 100.000/titik |
| | 6. test pit dan penutupan | Rp | 200.000/contoh |
| | 7. kepadatan lapangan γ_d tanah/batuan | | |
| | a) kepadatan lapangan γ_d dengan selongsong (ring) | Rp | 46.000/contoh |
| | b) kepadatan lapangan γ_d dengan konus pasir (sand cone) | Rp | 46.000/contoh |
| | 8. pengujian mutu (quality control) | | |
| | a) CBR on Place Sirtu | Rp | 75.000/titik |
| | b) CBR on Place Makadam | Rp | 75.000/titik |
| | c) CBR on Place Tanah Dasar | Rp | 75.000/titik |
| | d) DCP Tanah | Rp | 75.000/titik |
| | 9. benkelmen beam | Rp | 120.000/titik |
| | 10. kekasatan permukaan (skid resistance) | Rp | 50.000/titik |
| | 11. tegangan geser (lapisan antara hotmix/batu alam) | Rp | 27.500/contoh |
| | 12. pemecahan batu kali/kapur | Rp | 23.500/contoh |
| | 13. pengeboran beton: | | |
| | a) kedalaman sampai dengan 10 cm | Rp | 225.500/titik |
| | b) kedalaman lebih dari 10 cm sampai dengan 20 cm | Rp | 451.000/titik |
| | c) kedalaman lebih dari 20 cm sampai dengan 30 cm | Rp | 676.500/titik |
| | 14. pemotongan beton | Rp | 22.000/contoh |
| | 15. pemeriksaan, jalan, jembatan dan pengairan: | | |
| | a) pemeriksaan contoh tanah. | | |
| | 1) triaxial | Rp | 110.000/contoh |
| | 2) konsolidasi | Rp | 140.000/contoh |
| | 3) direct shear | Rp | 54.000/contoh |
| | 4) unconfined | Rp | 30.870/contoh |
| | 5) hidrometer | Rp | 80.000/contoh |
| | 6) analisis saringan | Rp | 30.000/contoh |
| | 7) atterberg limit | Rp | 65.000/contoh |
| | 8) berat jenis | Rp | 20.000/contoh |
| | 9) berat isi | Rp | 15.000/contoh |
| | 10) kadar air | Rp | 15.000/contoh |

| | | | |
|----|--|----|----------------|
| | 11) permeability | Rp | 82.000/contoh |
| | 12) shrinkage limit | Rp | 56.000/contoh |
| | 13) percobaan pemedatan | Rp | 150.000/contoh |
| | 14) percobaan CBR laboratorium | Rp | 94.550/contoh |
| b) | pemeriksaan beton: | | |
| | 1) percobaan mix design beton | Rp | 364.000/contoh |
| | 2) slump test (3 x percobaan) | Rp | 36.500/contoh |
| | 3) kuat tekan kubus/silinder/paving block | Rp | 10.000/contoh |
| c) | pemeriksaan kualitas semen | Rp | 135.000/contoh |
| d) | pemeriksaan batuan: | | |
| | 1) test kualitas sirtu | Rp | 275.000/contoh |
| | 2) test kualitas macada | Rp | 200.000/contoh |
| | 3) test kualitas spleet, screening (hotmix) | Rp | 250.000/contoh |
| | 4) test kualitas spleet (beton) | Rp | 200.000/contoh |
| | 5) test abu batu | Rp | 150.000/contoh |
| | 6) pemeriksaan index kepipihan | Rp | 50.000/contoh |
| e) | pemeriksaan pasir: | | |
| | 1) test kualitas pasir pasang | Rp | 50.000/contoh |
| | 2) test kualitas pasir beton | Rp | 110.000/contoh |
| | 3) pemeriksaan pasir untuk konstruksi jalan | Rp | 100.000/contoh |
| f) | pemeriksaan aspal beton (hotmix): | | |
| | 1) mix design hotmix | Rp | 500.000/contoh |
| | 2) mix design hotmix dan additive | Rp | 600.000/contoh |
| | 3) test job mix aspal beton | Rp | 300.000/contoh |
| | 4) density hotmix | Rp | 100.000/contoh |
| g) | pemeriksaan kualitas aspal: | | |
| | 1) pemeriksaan aspal emulsi | Rp | 400.000/contoh |
| | 2) pemeriksaan aspal cair | Rp | 375.000/contoh |
| | 3) pemeriksaan aspal semen | Rp | 350.000/contoh |
| | 4) sieve test aspal emulsi | Rp | 50.000/contoh |
| | 5) storage stability 24 hour aspal emulsi | Rp | 50.000/contoh |
| | 6) cement mixing aspal emulsi | Rp | 50.000/contoh |
| | 7) kinematik viscositas aspal | Rp | 60.000/contoh |
| | 8) pemeriksaan kadar air aspal (hotmix) dengan cara destilasi | Rp | 120.000/contoh |
| | 9) pemeriksaan asbuton/micro asbuton | Rp | 270.000/contoh |
| | 10) ekstraksi asbuton/micro dengan asbuton | Rp | 160.000/contoh |

| | | | |
|-----|---|----|-------------------------|
| | h) pemeriksaan kadar gilsonite | Rp | 100.000/contoh |
| | i) pemeriksaan berat jenis semen | Rp | 21.000/contoh |
| | j) pemeriksaan gravity maximum mixture hotmix (gmm) | Rp | 60.000/contoh |
| | k) pemeriksaan air bersih | Rp | 58.500/contoh |
| | l) pemeriksaan air limbah/sungai | Rp | 104.000/contoh |
| | m) bor klasifikasi | Rp | 140.000/titik |
| | n) cone penetrometer | Rp | 56.000/titik |
| | o) kualitas tanah | Rp | 275.000/contoh |
| | p) proktor | Rp | 150.000/contoh |
| | q) shallow boring | Rp | 50.000/titik |
| | r) geo listrik | Rp | 165.000/titik |
| | s) seismic per meter rentang | Rp | 16.800/meter rentang |
| | t) tvane test | Rp | 18.000/meter rentang |
| | u) kuat tekan dengan hammer test | Rp | 5.000/titik |
| | v) wheel tracking test | Rp | 550.000/contoh |
| | w) indirect tensile modulus test UTM UMATA | Rp | 500.000/contoh |
| | x) kuat tarik besi beton sampai dengan 25 mm | Rp | 70.000/contoh |
| 16. | Biaya mobilisasi pekerjaan lapangan | | |
| a) | Mobilisasi quality control: | | |
| | 1) test pit dan penutupan | Rp | 130.000/3 titik |
| | 2) pengujian mutu (Quality Control): | | |
| | a)) CBR On Place Sirtu | Rp | 195.000/10 titik |
| | b)) CBR on Place macadam | Rp | 195.000/10 titik |
| | c)) CBR On Place Hotmix | Rp | 130.000/15 titik |
| | d)) CBR On Place Tanah Dasar | Rp | 195.000/15 titik |
| | 3) benkelman beam | Rp | 195.000/10 titik |
| | 4) kekasatan permukaan (Skid Resistance) | Rp | 130.000/15 titik |
| | 5) pengeboran beton | Rp | 130.000/10 titik |
| | 6) kepadatan lapangan | Rp | 130.000/15 titik |
| | 7) shallow boring | Rp | 130.000/10 titik |
| | 8) Kuat tekan dengan Hammer test | Rp | 130.000/30 titik |
| b) | Mobilisasi colecting data mekanika tanah: | | |
| | 1) sondir Ringan (kapasitas 2,5 tonf) | Rp | 195.000/2 titik |
| | 2) bor dangkal (bor tangan) | Rp | 195.000/2 titik |
| | 3) sondir berat (kapasitas 10 tonf) | Rp | 390.000/1 titik |

| | | | |
|----|---|----|-------------------------------------|
| | 4) bor dalam (bor mesin) | Rp | 390.000/ 1 titik |
| | 5) bor klasifikasi | Rp | 130.000/ 10 titik |
| | 6) cone penetrometer | Rp | 130.000/ 15 titik |
| | 7) geo listrik | Rp | 130.000/ 15 titik |
| | 8) seis mic per/m/rentang | Rp | 130.000/ 100 m rentang |
| | 9) vane test | Rp | 100.000/ 2 titik |
| c. | Pemakaian peralatan ukur dan Mobilisasi: | | |
| | 1. Pengukuran (Profile, Uitzet & Peil Control) Saluran bentangan lebih kecil atau sama dengan 3 m | Rp | 710/ m' |
| | 2. Pengukuran (Profile, Uitzet & Peil Control) saluran/ Kali bentangan lebih besar dari 3 m | Rp | 765/ m' |
| | 3. Pengukuran jalan (Profile, Uitzet & Peil Control) Jalan lebar lebih kecil atau sama dengan 10 m | Rp | 710/ m' |
| | 4. Pengukuran Jalan (Profile, Uitzet & Peil Control) jalan lebar lebih besar dari 10 m | Rp | 765/ m' |
| | 5. Pengukuran (Collecting Data, Uitzet & Peil Control) peil lantai bangunan, peil banjir | Rp | 350/ m ² |
| | 6. Pengukuran waduk / situ (Collecting Data, Uitzet Dan Peil Control) | Rp | 400/ m ² |
| | 7. Pengukuran jembatan (Profile, Uitzet& Peil Control) | Rp | 480.000/ 1 buah jembatan |
| | 8. Mobilisasi pengukuran: | | |
| | a) Pengukuran (Profile, Uitzet & Peil Control) saluran bentangan lebih kecil atau sama dengan 3 m | Rp | 130.000/ 1.000 m' |
| | b) Pengukuran (Profile, Uitzet & Peil Control) saluran/ Kali bentangan lebih besar dari 3 m | Rp | 130.000/ 1.000 m' |
| | c) Pengukuran Jalan (Profile, Uitzet,Peil Control) jalan lebar lebih kecil atau sama dengan 10 m | Rp | 130.000/ 1.000 m' |
| | d) Pengukuran jalan (Profile, Uitzet & Peil Control) jalan lebar lebih besar dari 10 m | Rp | 130.000/ 1.000 m' |
| | e) Pengukuran (Collecting Data,Uitzet & Peil Control) peil lantai bangunan,peil banjir | Rp | 130.000/ 0-10.000 m ² |
| | f) Pengukuran waduk/situ (Collecting Data,Uitzet dan Peil Control) | Rp | 130.000/ 0-10.000 m ² |
| | g) Pengukuran jembatan (Profile, Uitzet& Peil Control) | Rp | 130.000/ 1 buah jembatan |

| | | | |
|----|---|----|-------------------------------|
| d. | Penyediaan sarana penempatan jaringan utilitas dan bangunan pelengkap yang disediakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Daerah | | |
| | 1. Kabel dan Pipa menggunakan bangunan ducting utilitas terpadu: | | |
| | a) Kabel | Rp | 5.000/meter/tahun |
| | b) Pipa : | | |
| | 1) diameter sampai dengan 300 milimeter | Rp | 5.000/meter/tahun |
| | 2) diameter 301 sampai dengan 500 milimeter | Rp | 15.000/meter/tahun |
| | 2. Kabel dan pipa tanpa menggunakan bangunan ducting utilitas terpadu: | | |
| | a) Kabel | Rp | 10.000/meter |
| | b) Pipa: | | |
| | 1) diameter sampai dengan 300 milimeter | Rp | 10.000/meter |
| | 2) diameter 301 sampai dengan 500 milimeter | Rp | 20.000/meter |
| | 3) diameter 501 sampai dengan 1000 milimeter | Rp | 30.000/meter |
| | 4) diameter lebih dari 1000 milimeter | Rp | 60.000/meter |
| | 3. Bangunan ducting utilitas terpadu, mainhole, handhole dan bak valve | Rp | 400.000/m ³ /tahun |
| | 4. Tiang Mikro Selluler Paling tinggi 15 meter | Rp | 1.000.000/titik |

D. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN

Tarif Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan

a. Bangunan gedung

Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung (RPP) diperuntukkan bagi kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi/renovasi dan pelestarian/ pemugaran dengan ketentuan sebagai berikut:

1. RPP untuk bangunan gedung ditentukan berdasarkan perkalian antara luas bangunan (L) dengan indeks terintegrasi (It) dan tarif/harga satuan retribusi bangunan gedung (HSbg) atau dengan rumus :

$$RPP = L \times It \times HSbg$$

2. Untuk obyek bangunan gedung dengan jenis kegiatan yang tidak dapat atau sulit dihitung menggunakan rumus sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a), RPP ditentukan sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) dari biaya pelaksanaan berdasarkan nilai perhitungan rencana anggaran biaya atau kontrak.
3. Indeks terintegrasi (It) ditentukan berdasarkan hasil perkalian indeks kegiatan (Ikg), indeks fungsi (If), indeks klasifikasi (Ik), indeks waktu penggunaan (Iw), dan indeks pengali tambahan (Ipt) atau dengan rumus:

$$It = Ikg \times If \times Ik \times Iw \times Ipt$$

4. Besarnya indeks kegiatan bangunan gedung (Ikg) ditentukan sebagai berikut:
 - a) pembangunan baru sebesar 1,00
 - b) rehabilitasi/ renovasi
 - 1) rusak sedang sebesar 0,45
 - 2) rusak berat sebesar 0,60
 - 3) pelestarian/pemugaran.
 - a)) pratama sebesar 0,65
 - b)) madya sebesar 0,45
 - c)) utama sebesar 0,30
5. Besarnya indeks fungsi bangunan gedung (If) ditentukan sebagai berikut:
 - a) Fungsi hunian sebesar 0,50 kecuali untuk rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana sebesar 0,05
 - b) Fungsi keagamaan sebesar 0,00

- c) Fungsi sosial dan Budaya sebesar 1,00 kecuali untuk bangunan gedung kantor milik Negara sebesar 0,00
 - d) Fungsi usaha sebesar 3,00
 - e) Fungsi campuran sebesar 4,00
 - f) Fungsi khusus sebesar 2,00
6. Besarnya indeks klasifikasi bangunan gedung (I_k) ditentukan berdasarkan penjumlahan dari hasil perkalian indeks parameter klasifikasi (I_{pk}) dengan bobot klasifikasi (B_{bt}) dengan rumus :
- $$I_k = \sum (I_{pk} \times B_{bt})$$

7. Besarnya bobot dan indeks parameter klasifikasi (I_{pk}) ditentukan sesuai Tabel I

| Klasifikasi | Bobot (Bbt) | Parameter | Indeks (Ipk) | $B_{bt} \times$ Ipk |
|----------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|------------------------|
| Kompleksitas | 0,25 | Sederhana | 0,40 | 0,100 |
| | | Tidak sederhana | 0,70 | 0,175 |
| | | Khusus | 1,00 | 0,250 |
| Permanensi | 0,20 | Darurat | 0,40 | 0,080 |
| | | Semi permanen | 0,70 | 0,140 |
| | | Permanen | 1,00 | 0,200 |
| Risiko kebakaran | 0,15 | Rendah | 0,40 | 0,060 |
| | | Sedang | 0,70 | 0,105 |
| | | Tinggi | 1,00 | 0,150 |
| Zonasi gempa | 0,15 | Zona I / minor | 0,10 | 0,015 |
| | | Zona II / minor | 0,20 | 0,030 |
| | | Zona III / sedang | 0,40 | 0,060 |
| | | Zona IV / sedang | 0,50 | 0,075 |
| | | Zona V / kuat | 0,70 | 0,105 |
| | | Zona VI / kuat | 1,00 | 0,150 |
| Kepadatan bangunan gedung | 0,10 | Renggang | 0,40 | 0,040 |
| | | Sedang | 0,70 | 0,070 |
| | | Padat | 1,00 | 0,100 |
| Ketinggian bangunan gedung | 0,10 | Rendah | 0,40 | 0,040 |
| | | Sedang | 0,70 | 0,070 |
| | | Tinggi | 1,00 | 0,100 |
| Kepemilikan | 0,05 | Negara/Yayasan | 0,40 | 0,020 |
| | | Perorangan | 0,70 | 0,035 |
| | | Badan usaha swasta | 1,00 | 0,050 |

8. Besarnya indeks waktu penggunaan bangunan gedung (I_w) ditentukan sebagai berikut :
- a) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6 (enam) bulan diberi indeks sebesar 0,40

- b) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah maksimum 3 (tiga) tahun diberi indeks sebesar 0,70
 - c) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun diberi indeks sebesar 1,00.
9. Penetapan indeks terintegrasi untuk beberapa unit bangunan gedung dengan perbedaan jumlah lantai/ketinggian dalam 1 (satu) kavling/persil ditetapkan untuk masing-masing unit atau blok massa bangunan gedung.
10. Penetapan indeks terintegrasi untuk bangunan gedung yang memiliki jumlah lantai dalam 1 (satu) unit atau blok massa bangunan gedung yang mempunyai bagian-bagian sayap (*wing*) dengan perbedaan jumlah lantai/ketinggian, ditetapkan berdasarkan lantai tertinggi.
11. Indeks pengali tambahan (Ipt) ditetapkan sebesar 1,00 kecuali untuk bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung yang berada atau terletak di bawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar 1,30.
12. Besarnya tarif/harga satuan retribusi Bangunan Gedung (HSbg) dinyatakan persatuan luas lantai bangunan bangunan gedung yang nilainya ditetapkan sama untuk semua jenis dan kategori bangunan gedung yaitu sebesar Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per meter persegi, kecuali Bangunan rumah tinggal (fungsi hunian sederhana) berupa rumah tinggal sederhana tunggal dan rumah tinggal sederhana deret ditetapkan Rp 0,- dengan kriteria :
- a) Bangunan rumah tinggal dengan ketinggian maksimal 2 (dua) lantai tanpa mezzanine, rongga atap, basement.
 - b) Luas bangunan dan luas tanah maksimal adalah 100 m².
 - c) Kepemilikan bangunan perorangan bukan badan usaha kecuali apabila kepemilikan perorangan memiliki lebih dari 1 unit dalam satu lingkungan yang sama.
13. RPP paling sedikit yang dikenakan terhadap pelayanan IMB ditetapkan sebesar Rp 500.000.

b. Prasarana bangunan

1. RPP prasarana bangunan gedung ditentukan berdasarkan perkalian antara volume/besaran dari masing-masing prasarana bangunan (V) dengan Indeks kegiatan (Ikg) dan tarif/harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$\text{RPP} = V \times \text{Ikg} \times \text{HSpbg}$$

2. Untuk obyek prasarana bangunan gedung dengan jenis kegiatan yang tidak dapat dihitung menggunakan rumus sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a, RPP ditetapkan sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) dari biaya pelaksanaan berdasarkan nilai perhitungan rencana anggaran biaya atau kontrak.

3. Besarnya indeks kegiatan prasarana bangunan (Ikg) gedung ditentukan sebagai berikut :
- pembangunan baru sebesar 1,00
 - rehabilitasi/renovasi
 - rusak sedang sebesar 0,45
 - rusak berat sebesar 0,60
4. Indeks kegiatan prasarana bangunan gedung (Ikg) untuk rumah tinggal tunggal sederhana, rumah deret sederhana, bangunan gedung fungsi keagamaan, serta bangunan gedung kantor milik Negara ditetapkan sebesar 0,00 (nol), kecuali bangunan gedung milik negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha serta bangunan gedung untuk instalasi, dan laboratorium khusus.
5. Indeks kegiatan prasarana bangunan gedung (Ikg) rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana ditetapkan 0 (nol) sebagaimana dimaksud pada huruf 4) hanya berlaku untuk prasarana bangunan berupa konstruksi perkerasan biasa dan konstruksi pembatas/pengaman, sedangkan untuk prasarana bangunan diluar dari konstruksi perkerasan biasa dan konstruksi pembatas/pengaman tetap dikenakan Indeks Kegiatan sesuai jenis kegiatannya.
6. Besarnya tarif/harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) dinyatakan persatuan volume prasarana yang nilainya ditetapkan sesuai dengan masing-masing jenis prasarana bangunan gedung sebagaimana tercantum dalam Tabel II.

Tabel II

| No | Jenis Prasarana | Satuan Vol | Tarif per satuan | Keterangan |
|----|--|----------------|------------------|--|
| 1 | Konstruksi perkerasan biasa | m ² | Rp 2.000 | Untuk aktifitas kegiatan sehari-hari spt perkerasan halaman, parkir dan sejenis |
| 2 | Konstruksi perkerasan khusus | m ² | Rp 5.000 | Menggunakan konstruksi khusus spt pelataran peti kemas, landasan pacu pesawat, dan sejenis |
| 3 | Konstruksi pembatas/pengaman/penahan | m' | Rp 2.000 | Termasuk pagar, turap dan kontruksi penahan lain yang bersifat mandiri |
| 4 | Pos jaga | unit | Rp 200.000 | Maks 4 m ² per unit, selebihnya dianggap luasan bangunan gedung |
| 5 | Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah | m ² | Rp 10.000 | Konstruksi mandiri; termasuk kolam renang, kolam pengolah limbah |

| No | Jenis Prasarana | Satuan Vol | Tarif per satuan | Keterangan |
|----|---|----------------|------------------|---|
| | | | | atau pengolah bahan cair lainnya. |
| 6 | Konstruksi menara air | unit | Rp 100.000 | Konstruksi mandiri, maks. 12 m ³ per unit; sebihnya setiap kelipatannya dihitung sebagai 1 unit |
| 7 | Konstruksi monumen | unit | Rp 500.000 | Merupakan retribusi paling sedikit, (apabila 1,75% dari biaya pembuatan tidak sampai batas yang ditetapkan) |
| 8 | Konstruksi instalasi/gardu | unit | Rp 500.000 | Termasuk rumah genset; maks 15 m ² per unit, sebihnya setiap kelipatannya dihitung sebagai 1 unit |
| 9 | Konstruksi penyimpan/silo | m ³ | Rp 2.000 | Penyimpan khusus bahan bakar, semen curah dan sejenisnya |
| 10 | Konstruksi menara bakar/ cerobong asap | unit | Rp 250.000 | Konstruksi mandiri. |
| 11 | Konstruksi monumen | unit | Rp 500.000 | Merupakan retribusi paling sedikit, (apabila 1,75% dari biaya pembuatan tidak sampai batas yang ditetapkan) |
| 12 | Konstruksi reklame | unit | Rp 3.000.000 | Konstruksi mandiri (diatas tanah atau bangunan); maks. 24 m ² per unit; sebihnya setiap kelipatannya dihitung sebagai 1 unit |
| 13 | Konstruksi menara jenis rangka ruang | m ³ | Rp 200.000 | Luas tapak tumpuan menara (A) dikalikan ketinggian menara (H) |
| 14 | Konstruksi menara jenis tiang tunggal (single pole) | unit | Rp 2.500.000 | Per 1 unit menara sampai dengan ketinggian 25 m dihitung Rp 2.500.000,- menara dengan ketinggian melebihi 25 m, sebihnya dihitung per unit kelipatannya |

| No | Jenis Prasarana | Satuan Vol | Tarif per satuan | Keterangan |
|----|---|------------|------------------|--|
| 15 | Konstruksi Dinding Penahan Tanah Mandiri (Retaining Wall) | m' | Rp 10.000 | Merupakan prasarana bangunan yang bukan merupakan bagian struktur bangunan dinding basement yang sifatnya mandiri. |

7. Besarnya tarif/harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) berupa prasarana penunjang pelaksanaan pembangunan seperti bedeng/direksi keet, pagar proyek yang sifatnya sementara dan berdiri hanya selama pelaksanaan pembangunan ditetapkan Rp 0,-.

E. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN

| | | | |
|----|---|----|---------|
| a. | Pemakaian tempat pemakaman : | | |
| | 1. Sewa tanah makam untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun | | |
| | a) blok AA.1 | Rp | 100.000 |
| | b) blok AA.II | Rp | 80.000 |
| | c) blok A.I | Rp | 60.000 |
| | d) blok A.II | Rp | 40.000 |
| | e) blok A.III | Rp | 0 |

2. Sewa tanah makam tumpangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besarnya retribusi sebagaimana tercantum dalam angka 1.
3. Perpanjangan sewa tanah makam adalah :
- Tiga tahun pertama 50% (lima puluh persen) dari besarnya retribusi sebagaimana tercantum dalam angka 1.
 - Tiga tahun berikutnya 100% (seratus persen) dari besarnya retribusi sebagaimana tercantum dalam angka 1.
 - Perpanjangan sewa tanah makam sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b), diajukan paling lama 3 (tiga) tahun setelah sewa tanah makam berakhir dan apabila tidak diperpanjang setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun dapat digunakan untuk pemakaman ulang.

| | | | |
|----|--|----|-------------------------|
| b. | Pemakasian lokasi Taman Untuk: | | |
| | 1. Shooting film : | | |
| | a) 1 sampai dengan 2 hari | Rp | 1.250.000/lokasi. |
| | b) 3 sampai dengan 4 hari | Rp | 2.000.000/lokasi |
| | c) 5 sampai dengan 8 hari | Rp | 2.500.000/lokasi |
| | d) diatas 8 hari dikenakan biaya tambahan | Rp | 250.000/hari/lokasi |
| | 2. Bazar, perlombaan, sarasehan, pameran, acara ritual dan kegiatan lainnya : | | |
| | a) sampai dengan 1.000 m ² | Rp | 1.000.000/5hari/lokasi |
| | b) 1001 sampai dengan 5.000m ² | Rp | 1.500.000/5 hari/lokasi |
| | c) 5001 sampai dengan 10.000 m ² | Rp | 2.000.000/5 hari/lokasi |
| | d) 10.001 sampai dengan 25.000 m ² | Rp | 2.500.000/5 hari/lokasi |
| | e) 25.000 m ² keatas | Rp | 3.000.000/5 hari/lokasi |
| | f) setiap penambahan per hari ditambah biaya 20 % (dua puluh persen) dari biaya pokok tarif. | | |
| | 3. Pemakaian lokasi taman untuk perkemahan : | | |
| | a) pelajar, pramuka, mahasiswa | Rp | 1.000./orang/hari |
| | b) umum. | Rp | 2.000./orang/hari |

| | | | |
|----|--|----|----------------------------|
| | 4. Penggunaan lokasi taman untuk bedeng proyek (Direksi Keet) dan sejenisnya : | | |
| | a) 0 sampai dengan 15 m ² | Rp | 50.000/hari/lokasi |
| | b) 16 sampai dengan 30 m ² | Rp | 75.000/hari/lokasi |
| | c) 31 sampai dengan 50 m ² | Rp | 100.000/hari/lokasi |
| | d) setiap penambahan 5 m ² diatas 50 m ² | Rp | 5.000/hari/lokasi |
| | 5. Penggunaan lokasi taman untuk material proyek dan pekerjaan sejenisnya : | | |
| | a) sampai dengan 100 m ² | Rp | 100.000/hari/lokasi |
| | b) 101 sampai dengan 200 m ² | Rp | 150.000/hari/lokasi |
| | c) 201 sampai dengan 300 m ² | Rp | 250.000/hari/lokasi |
| | d) Lebih dari 300 m ² | Rp | 300.000/hari/lokasi |
| | e) Setiap penambahan 10 m ² diatas 300m ² | Rp | 100.000/hari/lokasi |
| | 6. Pemakaian lokasi taman dan jalur hijau pada titik lubang tiang umbul-umbul | Rp | 3.000/hari/lubang |
| c. | Pemakaian Peralatan Pertamanan : | | |
| | 1. Tenda kemah | | |
| | a. Pelajar dan mahasiswa | | |
| | 1) Ukuran 2 orang | Rp | 5.000/hari/unit |
| | 2) Ukuran 6 orang | Rp | 7.500/hari/unit |
| | 3) Ukuran 10 orang | Rp | 10.000/hari/unit |
| | b. Umum | | |
| | 1) Ukuran 2 orang | Rp | 10.000/hari/unit |
| | 2) Ukuran 6 orang | Rp | 15.000/hari/unit |
| | 3) Ukuran 10 orang | Rp | 20.000/hari/unit |
| | 2. Tiang umbul-umbul | Rp | 3.000/hari/unit |
| d. | Pemakaian lokasi kebun bibit Dinas Pertamanan | Rp | 2.000.000/ha/tahun |
| e. | Penggunaan bangunan dilokasi taman, jalur dan kebun bibit : | | |
| | 1. Green House kebun bibit Srengseng, Ciganjur | Rp | 1.500/m ² /hari |
| | 2. Rumah kaca Taman Menteng | Rp | 2.000.000/hari |
| | 3. Gedung Pertemuan Taman Langsat | Rp | 1.000.000/hari |
| f. | Pemakaian peralatan perawatan jenazah | Rp | 75.000/jenazah |
| g. | Pemakaian kendaraan jenazah dan kelengkapannya : | | |
| | 1. untuk dalam kota | Rp | 100.000/sekali pakai |
| | 2. untuk luar kota | Rp | 1.500/kilo meter |
| h. | Pemakaian lokasi taman pemakaman untuk shooting film: | | |
| | 1. sampai dengan 2 hari | Rp | 1.000.000/lokasi |

| | | | |
|----|---|----|-----------------------|
| | 2. 3 sampai dengan 4 hari | Rp | 1.500.000/lokasi |
| | 3. 5 sampai dengan 8 hari | Rp | 2.000.000/lokasi |
| | 4. lebih dari 8 hari dikenakan biaya tambahan | Rp | 200.000/hari/lokasi |
| i. | Pemakaian Plaza Taman, Jalan Silang Monumen Nasional, Areal Taman Medan Merdeka dan Taman Monumen Soekarno-Hatta Proklamator Kemerdekaan RI, Plaza Teater Jakarta untuk kegiatan perlombaan, sarasehan, acara ritual dan sejenisnya : | | |
| | 1. Luas sampai dengan 1.000 m ² | Rp | 500.000/hari/lokasi |
| | 2. Luas 1.001 sampai dengan 5.000 m ² | Rp | 1.000.000/hari/lokasi |
| | 3. Luas 5.001 sampai dengan 10.000 m ² | Rp | 1.250.000/hari/lokasi |
| | 4. Luas 10.001 sampai dengan 25.000 m ² | Rp | 1.500.000/hari/lokasi |
| | 5. Luas lebih dari 25.000 m ² | Rp | 2.000.000/hari/lokasi |
| | | | |

F. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

| | | | |
|----|---|----|-----------------------|
| a. | Pengangkutan sampah perumahan/rumah tinggal | Rp | 0 |
| | 1. luas bangunan sampai dengan 70 m ² | Rp | 0 |
| | 2. luas bangunan 71 m ² sampai dengan 150 m ² | Rp | 0 |
| | 3. luas bangunan 151 m ² sampai dengan 250 m ² | Rp | 0 |
| | 4. luas bangunan 251 m ² sampai dengan 300 m ² | Rp | 0 |
| | 5. luas bangunan 301 m ² keatas | Rp | 0 |
| b. | Pengangkutan sampah toko, warung makan, apotik, bengkel, bioskop, tempat hiburan lainnya, penjahit/konpeksi, salon barbershop, panti pijat, bola sodok, binatu dan lain-lain. | | |
| | 1. kecil (volume sampah sampai dengan 0,75 m ³ /bulan) | Rp | 25.000/bln |
| | 2. besar (volume sampah lebih dari 0,76 m ³ /bulan) | Rp | 30.000/bln |
| c. | Pengangkutan sampah minimum 2,5 m ³ dari lokasi industri, pusat pertokoan/plaza, perkantoran, pasar swalayan, motel, hotel, penginapan, taman hiburan/ rekreasi, rumah makan/restoran, perbengkelan, apartemen | Rp | 40.000/m ³ |
| d. | Pengangkutan sampah non bahan berbahaya beracun dari rumah sakit, poliklinik dan laboratorium minimum 1,00 m ³ | Rp | 25.000/m ³ |
| e. | Pengangkutan sampah dari pasar PD Pasar Jaya dan lokasi Pedagang | Rp | 20.000/m ³ |
| f. | Penyediaan tempat pembuangan/pemusnahan akhir Sampah (TPA sampah). | Rp | 25.000/m ³ |
| g. | Penyedotan kakus/tangki septikteng paling sedikit 2 m ³ | Rp | 70.000/m ³ |
| h. | Penyediaan lokasi instalasi pengolahan air buangan (LIPAB) | Rp | 25.000/m ³ |
| i. | Pemakaian toilet berjalan | | |
| | - VIP | Rp | 400.000/toilet/hari |
| | - Container | Rp | 325.000/toilet/hari |

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T PURNAMA

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA
 NOMOR 1 TAHUN 2015
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

B. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum / Khusus Milik Pemerintah Daerah:

| I. | TINDAKAN RAWAT JALAN PAGI | Rp | |
|----|-----------------------------|----|--------|
| 1 | Pemeriksaan | Rp | 10.000 |
| 2 | Aff Contact Lens | Rp | 10.000 |
| 3 | Edukasi Kelompok per orang | Rp | 10.000 |
| 4 | Injeksi | Rp | 10.000 |
| 5 | Loop Mata | Rp | 10.000 |
| 6 | Patching | Rp | 10.000 |
| 7 | Senam Hamil | Rp | 10.000 |
| 8 | Slit lamp | Rp | 10.000 |
| 9 | Konsultasi Internal | Rp | 10.000 |
| 10 | Pasang spalk kecil | Rp | 10.000 |
| 11 | Suntik TT | Rp | 10.000 |
| 12 | Konsultasi Kosmetik | Rp | 10.000 |
| 13 | MEMORY/MMSE | Rp | 10.000 |
| 14 | MMT | Rp | 10.000 |
| 15 | Pemeriksaan POSTURE | Rp | 10.000 |
| 16 | ROM | Rp | 10.000 |
| 17 | Auditory Retraining | Rp | 15.000 |
| 18 | Ingatan Bahasa | Rp | 15.000 |
| 19 | Klinik Memory | Rp | 15.000 |
| 20 | Sensor-Motory Retraining | Rp | 15.000 |
| 21 | Train The Brain | Rp | 15.000 |
| 22 | Visual Retraining | Rp | 15.000 |
| 23 | Baby Gym | Rp | 20.000 |
| 24 | Cabut Jahitan 0-10 Jahitan | Rp | 20.000 |
| 25 | Chiropraksi | Rp | 20.000 |
| 26 | Daya Tahan | Rp | 20.000 |
| 27 | Ear Toilet | Rp | 20.000 |
| 28 | Eye Toilet Kecil | Rp | 20.000 |
| 29 | Ganti Balutan <10cm | Rp | 20.000 |
| 30 | Injeksi khusus | Rp | 20.000 |
| 31 | Ischiara Test | Rp | 20.000 |
| 32 | Kaustik Tenggorokan | Rp | 20.000 |
| 33 | Keseimbangan dan Koordinasi | Rp | 20.000 |
| 34 | Konsultasi Gizi | Rp | 20.000 |

| | | | | |
|--|----|--|----|--------|
| | 35 | Massage (Lokal Area) | Rp | 20.000 |
| | 36 | Pasang spalk sedang | Rp | 20.000 |
| | 37 | Pelatihan POSTURE | Rp | 20.000 |
| | 38 | Pernafasan dan Relaksasi | Rp | 20.000 |
| | 39 | Probing | Rp | 20.000 |
| | 40 | Reflexiologi (tangan & Kaki) | Rp | 20.000 |
| | 41 | Suntik cyclofe/KB 1 bln | Rp | 20.000 |
| | 42 | Suntik depoprovera/KB 3 bln | Rp | 20.000 |
| | 43 | Vitalisasi Otak (Ikhtisar) | Rp | 20.000 |
| | 44 | Inhalasi Terapi | Rp | 30.000 |
| | 45 | Terapi Kerja (OT) | Rp | 30.000 |
| | 46 | Terapi Wicara (ST) | Rp | 30.000 |
| | 47 | Aff kateter oleh dokter spesialis | Rp | 30.000 |
| | 48 | Baby Massage | Rp | 30.000 |
| | 49 | Benda Asing Hidung Tanpa Anastesi | Rp | 30.000 |
| | 50 | Benda Asing Telinga Tanpa Anastesi | Rp | 30.000 |
| | 51 | Cerumen Prop Tanpa Anastesi | Rp | 30.000 |
| | 52 | Energizing (Full Body Massage) | Rp | 30.000 |
| | 53 | Eye Toilet Besar | Rp | 30.000 |
| | 54 | Fitting bandage lens (1 eye) | Rp | 30.000 |
| | 55 | Ganti verban | Rp | 30.000 |
| | 56 | Heacting | Rp | 30.000 |
| | 57 | Kaustik Telinga | Rp | 30.000 |
| | 58 | Mantoux Test (PPD 0,1) | Rp | 30.000 |
| | 59 | Manual Terapi (Lokal Area) | Rp | 30.000 |
| | 60 | Pasang spalk besar | Rp | 30.000 |
| | 61 | Pedagogic | Rp | 30.000 |
| | 62 | Perawatan luka | Rp | 30.000 |
| | 63 | Pungsi Abses | Rp | 30.000 |
| | 64 | Refraksi Dewasa | Rp | 30.000 |
| | 65 | Relaksasi (Refleksologi tangan-kaki, leher-pundak) | Rp | 30.000 |
| | 66 | Toilet Hidung | Rp | 30.000 |
| | 67 | Wound Dressing | Rp | 30.000 |
| | 68 | Wound Toilet kecil | Rp | 30.000 |
| | 69 | Benda Asing Tenggorokan | Rp | 35.000 |
| | 70 | Cabut Jahitan >10 Jahitan | Rp | 35.000 |
| | 71 | Dilatasi fimosis | Rp | 35.000 |
| | 72 | Epilasi | Rp | 35.000 |
| | 73 | Extraksi Gram/Corp. Alienum Palp | Rp | 35.000 |
| | 74 | Ganti Balutan >10cm | Rp | 35.000 |

| | | | | |
|--|-----|--|----|--------|
| | 75 | Hecting Palpebra | Rp | 35.000 |
| | 76 | Injeksi Infra Artikuler | Rp | 35.000 |
| | 77 | Normal Dressing | Rp | 35.000 |
| | 78 | Refraksi Anak | Rp | 35.000 |
| | 79 | Sensory - Integrasi | Rp | 35.000 |
| | 80 | Snozelen | Rp | 35.000 |
| | 81 | Wound Toilet sedang | Rp | 35.000 |
| | 82 | Aff Hecting Kulit | Rp | 35.000 |
| | 83 | Aff Tampon Nasal | Rp | 35.000 |
| | 84 | Nekrotomi | Rp | 35.000 |
| | 85 | Pemasangan IUD tanpa narkose | Rp | 35.000 |
| | 86 | Imobilisasi dengan Elastic Verban | Rp | 45.000 |
| | 87 | Chloretyl Spray Sedang | Rp | 45.000 |
| | 88 | Facial | Rp | 45.000 |
| | 89 | Pemeriksaan + Konsultasi PMS | Rp | 45.000 |
| | 90 | Spoeling | Rp | 45.000 |
| | 91 | Spoeling mata | Rp | 45.000 |
| | 92 | Aspirasi cairan | Rp | 45.000 |
| | 93 | Debridement | Rp | 45.000 |
| | 94 | Epistaxis Cevere | Rp | 45.000 |
| | 95 | Extraksi Gram/Corp. Alienum Kornea | Rp | 45.000 |
| | 96 | imobilisasi dengan elastis verban 6 inch | Rp | 45.000 |
| | 97 | Paket B (snozelen/sensory-integrasi, stimulasi-terapi) | Rp | 45.000 |
| | 98 | Paresentase / Miringotomi | Rp | 45.000 |
| | 99 | Pengambilan Cairan Lambung | Rp | 45.000 |
| | 100 | Wound Toilet besar | Rp | 45.000 |
| | 101 | Podofilin / TCA (S) | Rp | 50.000 |
| | 102 | Ekstrasi Komedo (S) | Rp | 50.000 |
| | 103 | Buka Gips Sesi | Rp | 50.000 |
| | 104 | Chloretyl Spray Besar | Rp | 50.000 |
| | 105 | Dacriocystografy | Rp | 50.000 |
| | 106 | Dekanulisasi | Rp | 50.000 |
| | 107 | Drainage abses | Rp | 50.000 |
| | 108 | Eksterpasi Lithiasis | Rp | 50.000 |
| | 109 | Insisi | Rp | 50.000 |
| | 110 | Kateterisasi | Rp | 50.000 |
| | 111 | Pap Smear | Rp | 50.000 |
| | 112 | Pemasangan alat persarium | Rp | 50.000 |
| | 113 | Pungsi Abses pada wajah | Rp | 50.000 |
| | 114 | Pre pungsi | Rp | 50.000 |

| | | | |
|-----|--|----|---------|
| 115 | Vestibulometri | Rp | 50.000 |
| 116 | Aspirasi perichondritis curicula | Rp | 60.000 |
| 117 | Infus Vit C per kunjungan | Rp | 60.000 |
| 118 | Bouginasi | Rp | 60.000 |
| 119 | Delsoralen Liquid | Rp | 60.000 |
| 120 | Ekstrasi Komedo (B) | Rp | 60.000 |
| 121 | Elektrokauter (S) | Rp | 60.000 |
| 122 | KIL | Rp | 60.000 |
| 123 | Melepas IUD tanpa narkose | Rp | 60.000 |
| 124 | Pasang Tampon Hidung | Rp | 60.000 |
| 125 | Podofilin / TCA (B) | Rp | 60.000 |
| 126 | Biopsi | Rp | 75.000 |
| 127 | Biopsi Nasopharynx | Rp | 75.000 |
| 128 | Biopsi Telinga Tanpa Anastesi | Rp | 75.000 |
| 129 | Biopsi Tumor Hidung | Rp | 75.000 |
| 130 | Buka Gips Sirkular | Rp | 75.000 |
| 131 | Buka Gips Tabung | Rp | 75.000 |
| 132 | Douglas Pungsi | Rp | 75.000 |
| 133 | WT-Combutio ≤ 30% | Rp | 75.000 |
| 134 | Elektrokauter (B) | Rp | 75.000 |
| 135 | Biopsi Jarum Halus / FNAB | Rp | 100.000 |
| 136 | Insisi Abses Peritonsil | Rp | 100.000 |
| 137 | Reposisi | Rp | 100.000 |
| 138 | Roster Plasty | Rp | 100.000 |
| 139 | TTB | Rp | 100.000 |
| 140 | Angkat Wire | Rp | 100.000 |
| 141 | Cystostomy | Rp | 100.000 |
| 142 | Kateterisasi batu | Rp | 100.000 |
| 143 | Kateterisasi dengan penyulit | Rp | 100.000 |
| 144 | Pemasangan susuk implan 1/3 KB dengan anastesi lokal | Rp | 100.000 |
| 145 | WT-Combutio > 30% | Rp | 100.000 |
| 146 | Eksisi Luar Muka / Eksisi Biopsi | Rp | 125.000 |
| 147 | Extirpasi Polip Nasi | Rp | 125.000 |
| 148 | Exterpasi Kiste Atroma | Rp | 125.000 |
| 149 | Eksisi | Rp | 150.000 |
| 150 | Hydrotubasi | Rp | 150.000 |
| 151 | Insisi Bartolini | Rp | 150.000 |
| 152 | Insisi Hordiolum/ Chalazion/Abses | Rp | 150.000 |
| 153 | Melepas susuk Dengan Anastesi Lokal | Rp | 150.000 |
| 154 | Pemasangan susuk implan 5/6 KB dengan anastesi lokal | Rp | 150.000 |

| | | | | |
|--|-----|--|----|---------|
| | 155 | Biopsi prostat | Rp | 150.000 |
| | 156 | Pleurodesis | Rp | 150.000 |
| | 157 | Necrotomi Mata | Rp | 175.000 |
| | 158 | Nekrotomi | Rp | 175.000 |
| | 159 | Pasang Gips Sesiisi | Rp | 175.000 |
| | 160 | Pasang Gips Sirkular | Rp | 175.000 |
| | 161 | Pasang Gips Tabung | Rp | 175.000 |
| | 162 | Pungsi Asites | Rp | 175.000 |
| | 163 | Pungsi Pleura | Rp | 175.000 |
| | 164 | Reduksi Tertutup | Rp | 175.000 |
| | 165 | Eksisi Muka | Rp | 175.000 |
| | 166 | Eksisi/ BE Tumor Jinak | Rp | 175.000 |
| | 167 | Eksterpasi kecil | Rp | 175.000 |
| | 168 | Myatoplasty | Rp | 200.000 |
| | 169 | Arthrocentesis | Rp | 200.000 |
| | 170 | Extirpasi Granuloma | Rp | 250.000 |
| | 171 | Extirpasi Pterygium | Rp | 250.000 |
| | 172 | Eksplorasi | Rp | 250.000 |
| | 173 | Vasectomy | Rp | 250.000 |
| | 174 | Biopsi/Eksisi Ganglion, Bursitis, Baker's Cys- | Rp | 250.000 |
| | 175 | Eksterpasi besar | Rp | 250.000 |
| | 176 | Kauter condyloma | Rp | 250.000 |
| | 177 | Sirkumsisi | Rp | 250.000 |
| | 178 | PMS Condyloma Accuminata | Rp | 250.000 |
| | 179 | Tapping Pericardial | Rp | 250.000 |

| II. TINDAKAN UNIT GAWAT DARURAT | | | | |
|--|----|-----------------------------------|----|--------|
| | 1 | Pemeriksaan | Rp | 15.000 |
| | 2 | Hitung denyut jantung janin (DJJ) | Rp | 10.000 |
| | 3 | Klisma | Rp | 10.000 |
| | 4 | Pasang spalk kecil | Rp | 10.000 |
| | 5 | Irigasi mata | Rp | 10.000 |
| | 6 | Pasang spalk sedang | Rp | 10.000 |
| | 7 | Visum | Rp | 20.000 |
| | 8 | Syringe Pump | Rp | 20.000 |
| | 9 | Insisi cross | Rp | 20.000 |
| | 10 | Inhalasi | Rp | 20.000 |

| | | | |
|----|---|----|---------|
| 11 | Cabut Jahitan 0-10 Jahitan | Rp | 20.000 |
| 12 | Pasang spalk besar | Rp | 20.000 |
| 13 | Hecting | Rp | 20.000 |
| 14 | Konsul visite Dokter Spesialis | Rp | 30.000 |
| 15 | Reposisi sendi rahang | Rp | 30.000 |
| 16 | Corpus Alineum bedah | Rp | 30.000 |
| 17 | Observasi > 8 jam sampai dengan 24 jam | Rp | 30.000 |
| 18 | Wound Toilet Sedang | Rp | 30.000 |
| 19 | Intubasi | Rp | 40.000 |
| 20 | Konsul Visit Dokter Spesialis Emergency (Jam 19.00 - 07.00 WIB) | Rp | 40.000 |
| 21 | Kumbah lambung | Rp | 40.000 |
| 22 | Cabut Jahitan >10 Jahitan | Rp | 40.000 |
| 23 | Wound Toilet Besar | Rp | 40.000 |
| 24 | Puncti vesica urinaria | Rp | 60.000 |
| 25 | Fiksasi IDW | Rp | 60.000 |
| 26 | Resusitasi | Rp | 60.000 |
| 27 | Reposisi dan pasang gips | Rp | 60.000 |
| 28 | Vena secti | Rp | 60.000 |
| 29 | Eksterpasi kuku | Rp | 60.000 |
| 30 | WT-Combutio > 30% | Rp | 60.000 |
| 31 | Pasang CVC | Rp | 100.000 |
| 32 | Punksi pleura | Rp | 100.000 |
| 33 | Chest Tube | Rp | 100.000 |
| 34 | Pemasangan Contraventil | Rp | 100.000 |

| III. KAMAR RAWAT INAP | | | | |
|------------------------------|---|----|-----------|--|
| 1 | Tarif Kamar Kelas 3 per hari | Rp | 50.000 | |
| 2 | Tarif Kamar Bayi | Rp | 50.000 | |
| 3 | Tarif Kamar Perawatan Khusus (isolasi) per hari | Rp | 150.000 | |
| 4 | Tarif Kamar Perinap per hari | Rp | 150.000 | |
| 5 | Tarif Kamar Intermediate / Hcu per hari | Rp | 250.000 | |
| 6 | Tarif Kamar ICU/ICCU | Rp | 1.000.000 | |
| 7 | Tarif Kamar NICU per hari | Rp | 1.000.000 | |

| IV. TINDAKAN RAWAT INAP KELAS 3 | | | |
|--|--------------------------------------|----|--------|
| 1 | Induksi folly catheter | Rp | 10.000 |
| 2 | Konsultasi Dokter | Rp | 10.000 |
| 3 | Visite dokter | Rp | 10.000 |
| 4 | Pasang bougie | Rp | 10.000 |
| 5 | Breast pump elektrik | Rp | 10.000 |
| 6 | Cabut Jahitan 0-10 Jahitan | Rp | 10.000 |
| 7 | Infus Pump | Rp | 10.000 |
| 8 | Inhalasi | Rp | 10.000 |
| 9 | Kasur Dekubitus | Rp | 10.000 |
| 10 | Konsultasi Gizi | Rp | 10.000 |
| 11 | Syringe Pump | Rp | 10.000 |
| 12 | Micro curetage | Rp | 20.000 |
| 13 | Traksi kulit | Rp | 20.000 |
| 14 | Cabut Jahitan >10 Jahitan | Rp | 20.000 |
| 15 | Irigasi mulut | Rp | 20.000 |
| 16 | Necrotomi | Rp | 20.000 |
| 17 | Biaya tindakan dasar | Rp | 30.000 |
| 18 | Buka gips sesisi | Rp | 30.000 |
| 19 | Insisi | Rp | 30.000 |
| 20 | Pasang kateter oleh dokter spesialis | Rp | 30.000 |
| 21 | Resusitasi | Rp | 40.000 |
| 22 | Vena secti | Rp | 40.000 |
| 23 | Biopsi dalam | Rp | 50.000 |
| 24 | Biopsi jarum halus | Rp | 50.000 |
| 25 | Biopsi sumsum tulang | Rp | 50.000 |
| 26 | Biopsi supervisial | Rp | 50.000 |
| 27 | Buka gips sirkular | Rp | 50.000 |
| 28 | Buka gips tabung | Rp | 50.000 |
| 29 | DC-Eksterpasi (+PA) | Rp | 50.000 |

| | | | | |
|--|----|--|----|---------|
| | 30 | TTB | Rp | 50.000 |
| | 31 | Pasang kateter dengan penyulit oleh dokter spesialis | Rp | 50.000 |
| | 32 | Lumbal pungsi | Rp | 75.000 |
| | 33 | Pleurodesis | Rp | 75.000 |
| | 34 | Eksterpasi kecil | Rp | 75.000 |
| | 35 | Pasang gips sesisi | Rp | 75.000 |
| | 36 | Pasang gips sirkular | Rp | 75.000 |
| | 37 | Pasang gips tabung | Rp | 75.000 |
| | 38 | Pungsi abses hati | Rp | 75.000 |
| | 39 | Pungsi asites | Rp | 75.000 |
| | 40 | Pungsi pleura | Rp | 75.000 |
| | 41 | WSD | Rp | 75.000 |
| | 42 | Arthrocentresis | Rp | 100.000 |
| | 43 | Eksterpasi besar | Rp | 100.000 |

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T PURNAMA